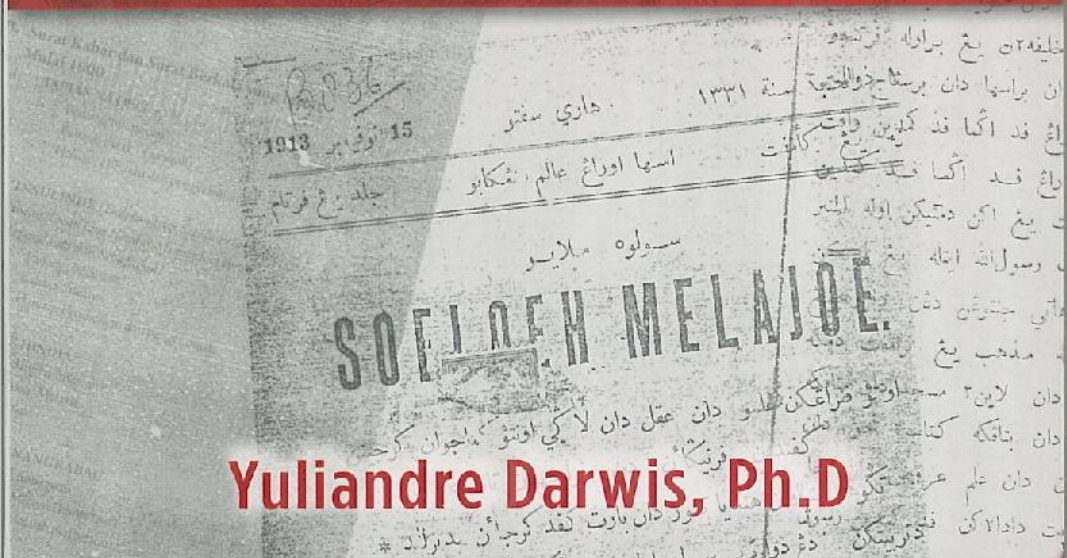


SEJARAH PERKEMBANGAN PERS MINANGKABAU (1859-1945)



Yuliandre Darwis, Ph.D

Peran penting pers dalam membentuk sejarah Minangkabau tak terbantahkan. Lahir dari tanggapan kritis terhadap perubahan zamannya, pers Minangkabau menampilkan mozaik situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dihidupi oleh orang-orang pada zamannya.

Kendati pers Minangkabau tergolong salah satu yang tertua di Indonesia, ternyata belum banyak tulisan yang secara mendalam mengangkat sejarah pers Minangkabau khususnya pada periode 1859–1950. Dalam konteks itulah buku ini mengambil perannya. Secara garis besar buku ini akan menunjukkan (1) latar belakang sejarah Minangkabau, adat-istiadat, dan budayanya; (2) sejarah pergerakan reformasi Islam di Minangkabau, yang bermula pada abad ke-8, ketika Islam diperkenalkan di Minangkabau oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat; (3) sejarah pers Minangkabau yang diawali dengan pemakaian bahasa dan abjad Arab-Melayu, sampai masa pemakaian bahasa Melayu sepenuhnya oleh media; dan (4) perkembangan pers Islami hingga organisasi dan lembaga pendidikan yang menjadi lokasi awal produksi sebelum akhirnya benar-benar berbentuk penerbitan.

Ditulis dengan metode historiografi, buku ini dengan lugas menekankan bahwa pers Minangkabau berkontribusi penting dalam pembentukan jiwa nasionalis hingga akhirnya turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Sudah lama kita kehilangan gambaran tentang dinamika lokal. Sistem media, termasuk penyiaran kita, terkonsentrasi di Jawa khususnya Jakarta. Ratusan kelompok etnis dan bahasa lokal tak lagi tergambar di media. Keanekaragaman terasa hilang. Buku ini rasanya menggugah kembali keinginan kita untuk memahami Indonesia secara utuh.”

—Amir Effendi Siregar

Dosen Komunikasi UII, Pemimpin Umum Majalah Warta Ekonomi, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)

“Sejak awal, perkembangan pers, sastra, pemikiran tertulis, dan segala bentuk pertaruhan gagasan nasional melalui media komunikasi berbahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau, paling tidak dibesarkan atau menuntut ilmu di daerah itu. Sekelunit nama di antaranya: Adinegoro, St. Takdir Alisyahbana, Marah Rusli, Rosihan Anwar, Usmar Ismail, Asrul Sani, Mochtar Lubis, P.K. Ojong, dll. Khusus dalam pers Islam nasional, misalnya, M. Natsir, HAMKA, Abu Hanifah, Mahmud Yunus.... Mudah-mudahan segera menyusul buku-buku sejarah perkembangan pers dari daerah-daerah lain.”

—Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D

Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com

ISBN: 978-979-22-9940-3



9 789792 299403
GM 20601130011

SEJARAH PERKEMBANGAN PERS MINANGKABAU

Yuliandre Darwis
GM 20601130011

Copyright © 2013 Yuliandre Darwis
Kompas Gramedia Building Blok I, Lt 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta Pusat 10270

Perwajahan isi dan sampul: Suprianto

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building Blok I, Lt 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta Pusat 10270
Anggota IKAPI, Jakarta, 2013

www.gramediapustakautama.com

ISBN: 978-979-22-9940-3

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.


**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dicetak oleh Percetakan Gramedia
Isi di luar tanggung jawab percetakan

SEJARAH PERKEMBANGAN PERS MINANGKABAU (1859-1945)

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

 **KOMPAS GRAMEDIA**

Daftar Isi

Pendahuluan	1
Ringkasan Isi	5
Kata Pengantar	7

Bab 1

Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau	10
1. Asal-usul Minangkabau	10
2. Budaya Minangkabau	15
3. Krisis Minangkabau Pada Abad ke-19	18
4. Peranan Rantau	22

Bab 2

Sejarah Pergerakan Islam Modern di Minangkabau	30
1. Tumbuh Kembang Islam di Minangkabau	30
2. Konsep Kemajuan	32
3. Gerakan Modern	36
4. Pertentangan Kaum Muda dan Kaum Tua	40

Bab 3

Sejarah Perkembangan Pers di Minangkabau	50
1. Bahasa Tulis dan Pers Sebagai Peranti Komunikasi	50
2. Bahasa Melayu dan Pers Minangkabau	55
3. Pers Minangkabau dari Masa ke Masa	57
4. Aktualisasi Perjuangan Pemikiran untuk Bangsa	72

Bab 4

Sejarah Pers Islam di Minangkabau	78
1. Perjalanan Pers Islam	78
2. Para Pelopor Pers Minangkabau	87
a. Mahyuddin Datuk Sutan Maharadja	87
b. Syekh Khatib Ali	90

c. Syekh Ahmad Khatib	97
d. Syekh Thaher Djalaluddin	99
e. Syekh Muhammad Djamil Djambek	101
f. Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul)	103
g. Haji Abdullah Ahmad	105
h. Syekh Ibrahim Musa	107
i. Zainuddin Labai Al-Junusi	108
3. Kesamaan dan Perbedaan Pers Islam dengan Lainnya ..	111
4. Wajah Institusi dan Organisasi di Bidang Sosial dan Pendi- dikan	117
a. Sekolah Adabiyah	117
b. Surau Jembatan Besi	117
c. Sumatera Thawalib	121
d. Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI)	127
e. Diniyah dan Al-Madrasah Al-Diniyah	130
5. <i>Soeloeh Melajoe vs. Al-Munir</i> dan <i>Majalah Al-Akhbar</i>	135
Lampiran I	151
Lampiran II	190
Daftar Pustaka	194
Tentang Penulis	205

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatra Barat, juga terkenal dengan nama Tanah Minangkabau, berposisi strategis dan signifikan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Tidak salah jika dikatakan Sumatra Barat merupakan provinsi paling berpengaruh di Indonesia. Masyarakat Minang, berjumlah 90 persen dari total penduduk Sumatra Barat, berkontribusi penting dalam pembentukan jiwa nasionalisme Indonesia. Ini dikarenakan iklim intelektual dan kesadaran sosial masyarakat tersebut. Yang paling menonjol adalah perjuangan melalui pemikiran mereka yang dituangkan di media demi kemerdekaan Indonesia.

Proses Islamisasi yang berkesinambungan dan pengenalan ide-ide baru oleh masyarakat Minang yang kembali dari merantau di luar negeri merupakan dua unsur utama dalam sejarah Minangkabau. Keinginan mempertahankan validitas nilai-nilai dan prinsip yang sudah ada serta desakan menghadapi hal-hal baru menghasilkan konflik sosial dan memunculkan usaha tak henti-hentinya untuk merumuskan Minangkabau yang baru. Sudut pandang tradisional, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai wejangan adat dan tergambar dalam tradisi sejarah (*tambo*) serta epik (*kaba*), menekankan perlunya menjaga kearifan leluhur, namun pada saat bersamaan menyadari pentingnya perubahan. Keduanya dipandang perlu demi terwujudnya masyarakat yang sempurna, tempat berpadunya norma sosial dan kosmik. Ke-

kuatan sudut pandang tradisional ini tecermin baik dalam konservatifnya sistem sosial Minangkabau dan perilaku dinamis yang kerap tampak pada anggotanya secara individu.

Menggeliatnya sejarah Minangkabau dipicu oleh perjuangan untuk membangun keseimbangan tatanan sosial dengan mempertemukan aspek-aspek sosial dan budaya yang tampak bertolak belakang. Semenjak Islam ditegakkan selaku pilar masyarakat Minangkabau, sejarah etnis ini didominasi upaya untuk menyeimbangkan secara proporsional ajaran agama yang universal dengan kearifan dan norma-norma landasan yang telah ada, yakni unsur adat. Pameo bahwa Islam merupakan bagian Minangkabau yang tak terpisahkan menimbulkan perlawanan internal secara terus-menerus.

Sejak permulaan abad ke-20, pergerakan Islam modern mulai menyebarkan pengaruh di Sumatra Barat. Ini dipelopori para ulama yang terpengaruh tren intelektual baru di Timur Tengah. Pergerakan tersebut bertujuan memurnikan praktik agama yang berlaku serta menggunakan Islam sebagai landasan perubahan sosial. Dalam prosesnya, ini memicu konflik agama dan sosial selama hampir dua dekade.

Para ulama modern, yang dikenal dengan sebutan ulama Kaum Muda, akhirnya menjadi mayoritas dalam pergerakan sosial dan politik Minangkabau. Aktivitas agama dan pendidikan ulama Kaum Muda beserta para murid dan pengikutnya meningkatkan jumlah sekolah agama yang modern. Karena program-program mereka berlandaskan Islam, para penggagas terobosan ini memperoleh dukungan dari aktivis keagamaan.

Debat antara Kaum Muda dan Kaum Tua mengarah pada argumentasi berkepanjangan. Ini terlihat dari propaganda melalui pembentukan opini publik di media. Sejarah Minangkabau

semakin berwarna setelah Kaum Muda dan Kaum Tua mendirikan surat kabar harian. Pers Minangkabau pun dialiri berbagai pemikiran berkat aktivitas kedua kaum ini.

Pers merupakan salah satu aspek sejarah Minang. Seperti aspek-aspek yang lain, kontribusinya cukup besar. Pers adalah produk sejarah dan turut membentuk sejarah itu sendiri. Pers Minang lahir sebagai tanggapan sebagian orang dari elemen tertentu yang kritis dan inovatif terhadap kesempatan atau perubahan di wilayah mereka. Keberadaan pers menciptakan sesuatu yang baru di daerah tersebut dengan menghadirkan harmoni (sekaligus mempertajam konflik) di masyarakat.

Pers Minangkabau menjadi sejenis kanvas untuk gambaran zaman yang menyajikan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya kawasan tersebut. Karena itulah, pers daerah tersebut menjadi topik penelitian dan diskusi yang menarik. Beberapa hal terkait pers Minang yang penulis bahas dalam buku ini adalah bentuk, warna, pendiri, aktivitas, kedudukan dalam kondisi sosial dan politik tertentu, serta perannya dalam pembentukan konsep nasionalisme.

Kendati pers Minangkabau tergolong salah satu yang tertua di Indonesia dan turut andil dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan, sejauh ini belum ada yang mengangkat sejarahnya secara spesifik. Di sini yang disorot adalah periode awal sewaktu pers Sumatra Barat terbentuk sampai masa kemerdekaan Republik Indonesia (1859-1950).

Keseluruhan isi buku ini berdasarkan disertasi penulis yang disusun dengan metode historiografi. Historiografi merupakan istilah multimakna yang berubah seiring waktu, tergantung tempat dan pengamatnya. Dengan demikian makna istilah ini tidak dapat disempitkan pada satu pengertian. Secara luas, historiografi

berkaitan dengan ilmu penulisan sejarah, mempelajari faktor-faktor seperti gaya penulisan, metode interpretasi, dan perangkat penelitian yang terus berkembang, namun juga dapat diartikan sebagai bagian kerja kesejarahan.

Referensi dan Bahan Bacaan

Di antara sejumlah rujukan utama yang penulis gunakan adalah buku Gusti Asnan yang berjudul *Pers Islam di Sumatera Barat Awal Abad 20: Suatu Tinjauan dalam Hubungannya dengan Gerakan Pembaharuan dan Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi* karya B.J.O. Schrieke. Buku Schrieke ini diterjemahkan dari bahasa Belanda, *Bijdrage tot de Bibliografie van de huidige godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust*. Dalam buku tersebut, B.J.O. Schrieke banyak mengupas pers Sumatra Barat, terutama pada abad ke-20.

Bahan bacaan lain ialah disertasi Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)* dan buku Hamka yang berjudul *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra*. Dengan terperinci, Hamka menguraikan ihwal meningkatnya harian dan majalah Islam di Sumatra Barat.

Pembahasan serupa yang tak kalah pentingnya dikemukakan dalam buku Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Meskipun tidak secara mendalam, buku ini dapat dikatakan lebih lengkap dibandingkan kedua buku yang disebut lebih dulu. Mahmud Yunus berusaha menerangkan perihal hampir semua majalah Islam yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Literatur selengkapnya dapat dilihat di Daftar Pustaka.

RINGKASAN ISI

Bab 1 memaparkan latar belakang kawasan Minangkabau, adat-istiadat, dan budayanya. Dijelaskan pula peran rantau, peran adat dan tradisi, serta kebudayaan. Tujuan rantau bagi orang Minangkabau adalah memperoleh pengetahuan, mempelajari keterampilan yang bermanfaat, atau mendapatkan pengalaman hidup. Di abad ke-19, beberapa warga Minangkabau kembali setelah merantau, dan ingin mengembalikan Islam sesuai syariah. Ini mengakibatkan Perang Padri di bawah pimpinan Imam Bonjol. Pemicunya adalah konflik kelompok adat yang mempertahankan tradisi setempat dengan kelompok rantau yang menghendaki pembaruan.

Bab 2 berisi sejarah pergerakan reformasi Islam di Minangkabau. Ini bermula pada abad ke-8, ketika Islam diperkenalkan di Minangkabau oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat. Gagasan mengenai kemajuan diajukan oleh sejumlah tokoh yang baru kembali dari rantau, terutama mereka yang pergi ke tanah Arab. Kelompok ini kemudian disebut Kaum Muda. Mereka bertentangan dengan Kaum Adat, yang menyebut diri Kaum Tua.

Kaum Tua mempraktikkan Islam yang dikombinasikan dengan adat dan tradisi Minangkabau. Debat yang dinamis berlangsung di kalangan masyarakat, media massa men-

jadi sarananya. Dalam bab ini, perkembangan pers dijelaskan terkait ketegangan antara dua kelompok besar di Minangkabau tersebut.

Bab 3 memaparkan sejarah pers Minangkabau, diawali dengan pemakaian bahasa dan abjad Arab-Melayu, sampai masa pemakaian bahasa Melayu sepenuhnya oleh media. Bab ini menerangkan secara terperinci “evolusi” sejarah pers Minangkabau, mulai dari penerbitan perdana pada tahun 1859 sampai kemerdekaan Indonesia resmi dideklarasikan pada tahun 1945. Di akhir bab, penulis mengemukakan konsep nasionalisme yang terbentuk pada masa itu, melalui pers.

Bab 4 mengetengahkan sejarah pers Islam di Minangkabau, menuturkan perkembangan pers Islami disusul perbedaan dan kesamaan pers Islami dengan yang lain. Kemudian dipaparkan pula tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan pers di Minangkabau berikut organisasi pembaruan tempat mereka melibatkan diri. Pertentangan Kaum Muda dan Kaum Tua diuraikan dalam perdebatan dan tulisan-tulisan di majalah *Soeloeh Melajoe*, *Al-Akhbar*, dan *Al-Muknir*. Penutup bab ini membahas beberapa perintis pers Islami di Minangkabau, juga organisasi dan lembaga pendidikan yang menjadi lokasi awal produksi sebelum akhirnya benar-benar berbentuk penerbitan.

KATA PENGANTAR

Buku ini memberikan gambaran tentang realitas dinamik masyarakat Minangkabau pada jamannya yang kemudian direfleksikan oleh pers pada masa itu. Membaca buku ini tidak hanya membaca sejarah pers Minangkabau tapi juga dinamika yang berkejolak dalam masyarakat Minangkabau. Kaum Muda sebagai representasi dari masyarakat ulama modern yang banyak diantaranya kembali dari rantau kemudian memahami Islam secara modern berhadapan dengan Kaum Tua yang tradisional yang mempraktikkan Islam dengan melakukan kombinasi terhadap adat dan tradisi Minangkabau. Sejarah Minangkabau semakin menarik, indah dan kaya warna setelah Kaum Muda dan Kaum Tua mendirikan surat kabar harian.

Sudah lama kita kehilangan gambaran tentang dinamika lokal. Sistem media termasuk penyiaran kita terkonsentrasi di Jawa, khususnya Jakarta. Ratusan kelompok etnis dan bahasa lokal, tak lagi tergambar di media. Keanekaragaman terasa hilang. Buku ini rasanya menggugah kembali keinginan kita untuk memahami Indonesia secara utuh, tidak hanya Jakarta. Bagaimana kita juga memahami Batak, Aceh, Sunda Bugis, Dayak, Minahasa, dan ratusan suku lainnya. Memahami kota Medan dengan dinamikanya, begitu juga Padang, Palembang, Makassar, Manado, dan ratusan bahkan ribuan kota lainnya.

Buku ini menggugah kita untuk membongkar konsentrasi isi dan kepemilikan media. Oleh karena itu sangat menarik, baik, penting dan pantas dibaca.

—Amir Effendi Siregar

sarjana komunikasi lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 1979. Memperoleh Master Arts dari School of Journalism and Mass Communication, University of Iowa, USA, (1987). Penulis kolom di berbagai media massa. Dosen Komunikasi UGM sampai dengan 1985. Kini adalah Dosen Komunikasi UII, Pemimpin Umum Majalah Warta Ekonomi, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) dan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.

Sejak awal, perkembangan pers, sastra, pemikiran tertulis, dan segala bentuk pertarungan gagasan nasional melalui media komunikasi berbahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau, paling tidak dibesarkan atau menuntut ilmu di daerah itu. Sekelumit nama, di antaranya: Adinegoro, St. Takdir Alisyahbana, Marah Rusli, Rosihan Anwar, Usmar Ismail, Asrul Sani, Mochtar Lubis, P.K. Ojong (tokoh penerbitan pers modern), dll. Khusus dalam pers Islam nasional, misalnya, terdapat penulis besar dari daerah itu, seperti M. Natsir, HAMKA, Abu Hanifah, Mahmud Yunus.

Namun begitu, kita hampir tidak mengetahui apa-apa tentang perkembangan pers di daerah Minangkabau itu sendiri. Apalagi mengenai peranannya dalam pertarungan antara pemikiran Islam Kaum Muda dengan tradisi adat Kaum Tua yang khas.

Pers tidak hidup dan berkembang sendiri terlepas dari dinamika masyarakat khalayaknya. Di sinilah letaknya kontribusi buku yang berasal dari penelitian ini. Mudah-mudahan segera disusul buku-buku sejarah perkembangan pers dari daerah-daerah lain.

—Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D

Guru Besar Emeritus Ilmu Komunikasi
Universitas Indonesia

Bab 1

Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau

1. Asal-usul Minangkabau

Provinsi Sumatra Barat sangat identik dengan alam Minangkabau. Suku Minangkabau bangga akan adat-istiadatnya, berpikiran jauh ke depan, dan merupakan pemeluk Islam yang taat. Sistem sosial mereka sangat berbeda dengan daerah lain.

Posisi Minangkabau dalam terbentuknya bangsa Indonesia tergolong krusial, sehingga Minangkabau layak disebut sebagai etnis yang paling berpengaruh di Indonesia. Kontribusi orang Minang dalam pembangunan semangat kebangsaan Indonesia dan kepemimpinan semasa kemerdekaan Indonesia cukup penting. Hal ini sesuai tulisan M.G. (Swift, 1971) dalam penelitiannya, *Minangkabau and Modernization*, "Siapa pun yang meneliti Indonesia pasti terkesan oleh keistimewaan suku Minangkabau. Upaya para penggerak Minangkabau baru terlihat jelas di banyak bidang, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok." (sumber?) Swift, M.G. (1971). *Minangkabau and Modernization, Anthropology The Oceania* 1971.

Beberapa orang dari etnis Minang menjadi pemimpin sejak kemerdekaan Indonesia. Kontribusi signifikan mereka dalam semangat kemerdekaan bukan hanya dikarenakan iklim intelektual dan kesadaran sosial masyarakatnya, namun juga propaganda melalui media massa. Taktik politik *Divide et Impera* yang suk-

ses diterapkan Belanda di wilayah lain Indonesia, mengalami kegagalan di Sumatra Barat atau tanah Minangkabau. Suatu kali, Belanda menawarkan otonomi khusus bagi Minangkabau, tetapi ditolak oleh masyarakat Minangkabau.¹

Di masa kini, tanah Minangkabau menjadi kawasan administratif, dengan nama resmi Provinsi Sumatra Barat. Tidak jelas alasan pemerintah Indonesia memilih nama tersebut. Meskipun hanya menjadi nama administratif, penamaan banyak provinsi di Pulau Sumatra memang agak membingungkan. Sumatra Utara, misalnya, terletak di bagian Utara Sumatra serta mencakup Medan, wilayah Batak, dan Pulau Nias, tetapi tidak meliputi ujung Sumatra sebelah Utara, yaitu Aceh. Selain itu, Sumatra Selatan tidak mencakup ujung Sumatra sebelah Selatan, yakni Lampung. Tidak ada provinsi yang bernama Sumatra Timur, meskipun Kepulauan Riau dan Lampung berada di bagian Timur Sumatra.

Dua ratus tahun silam, William Marsden menjelaskan lokasi Pulau Sumatra yang membingungkan ini. Pada dasarnya, orientasi pulau itulah yang menimbulkan kebingungan. Posisi Sumatra membentuk sudut 45 derajat. Oleh sebab itu, ahli geografi menemui kesulitan menentukan apakah Sumatra terbentang dari Timur ke Barat atau dari Utara ke Selatan. Garis pantainya yang berbatasan dengan Samudra Hindia terkadang disebut pantai Selatan, dan adakalanya disebut pantai Barat Sumatra.²

Pada tahun 1950, dilakukan diskusi guna menentukan lokasi Pulau Sumatra. Dari diskusi tersebut, diputuskanlah bahwa Sumatra terbentang dari Utara ke Selatan. Berhubung pemerintah pusat ingin menghindari atau mengurangi ikatan emosional dengan rasa kedaerahan, ditetapkanlah bahwa nama provinsi disesuaikan dengan orientasi arahnya, yaitu Sumatra

Utara, Sumatra Barat, dan seterusnya. Akan tetapi, Aceh menolak disatu-wilayahkan dengan Batak di kawasan Sumatra Utara, lalu mengajukan permohonan pada pemerintah pusat agar dijadikan daerah khusus.

Dalam bukunya yang berjudul *The History of Sumatra* dan diterbitkan tahun 1811, Marsden menulis bahwa Sultan Turki dan Kaisar Cina sama-sama menganggap Raja Minangkabau sebagai "saudara". Cap resmi kedua kerajaan itu selalu bersisian dengan stempel kerajaan Minangkabau di setiap surat atau dokumen resmi. Marsden menjelaskan bahwa sepanjang abad ke-18, tiga raja itu memerintah Minangkabau secara simultan dan inilah periode keemasan kerajaan tersebut. Mereka menyandang tiga gelar kenegaraan, yakni Wakil Tuhan, Sultan Sungai Emas, dan Penguasa Air dan Awan. Raja-raja Minangkabau pun memiliki berbagai aset istimewa, seperti tambang emas dan bunga campa biru yang hanya tumbuh di Minangkabau. Di tempat lain, bunga ini berwarna kuning.

Tambang-tambang emas yang terletak di Minangkabau menjadikan Sumatra, yang juga disebut "swarnadwipa" atau "pulau emas", terkenal. Tambang-tambang emas tersebut, serta lada, yang pertama kali menarik kedatangan Portugis, yang kemudian disusul oleh Belanda, ke Sumatra Barat. Namun, mereka hanya mampu memasuki pantai Timur Sumatra dan tidak dapat "mengalahkan" dataran tinggi Minangkabau.

Tulisan yang terukir di batu serta memakai abjad Hindi dan berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha zaman Sriwijaya dan Melayu menuturkan kisah tentang "Sultan Sungai Emas" yang mengirimkan emas melalui perairan Indragiri dan Siak. Kedua sungai ini mengalir dari dataran tinggi Minangkabau ke pantai barat Sumatra. Disebutkan pula bahwa etnis Minang-

lah yang pertama kali mendiami ibukota kerajaan Sriwijaya, di dekat Palembang. Kerajaan Minangkabau kaya akan emas dan menopang kerajaan Sriwijaya selama abad ke-7 M, yakni masa kejayaan Buddhisme.

Pada tahun 1817, terjadi pertempuran Waterloo yang mendesak Inggris menyerahkan Provinsi Jawa pada Belanda. Saat itu Nusantara (nama lama Indonesia) terdiri atas empat provinsi, yaitu Sumatra Barat, Malaka, Maluku, dan Jawa. Dari Jawa, Raffles berlayar ke Sumatra dan mendirikan rumah di Bengkulu, kira-kira 200 kilometer dari Kota Padang. Di sanalah ia menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan.

Alasan Raffles menjelajahi tanah Minangkabau bukanlah rasa ingin tahu semata, penemuan geografis, maupun emas, melainkan murni politik. Raffles melihat pengaruh Kerajaan Minangkabau masih terasa dan diakui di seluruh Sumatra. Dengan dukungan Inggris, Raffles yakin begitu Kerajaan Minangkabau meraih kekuatan kembali, itulah permulaan pembangunan jaringan perdagangan baru dengan Inggris dan bersatunya kerajaan tersebut dengan "bangsa" Melayu. Raffles menginginkan Sumatra diperintah lagi oleh Minangkabau dan menggunakan Kerajaan Minangkabau sebagai pertahanan Inggris terhadap Belanda.³

Raffles datang berkunjung karena ingin menggali misteri dataran tinggi Minangkabau. Ia sangat terkesan oleh garis keturunan Minang, seperti dijelaskan Marsden. Raffles pun tertarik pada kesamaan etnis Minang dengan orang-orang yang disebutnya "bangsa Melayu". Sebelumnya Marsden memperkirakan keterkaitan Minangkabau dengan wilayah pantai Malaysia berdasarkan kesamaan bahasa, agama Islam yang sama-sama mereka peluk, serta banyaknya pemimpin Melayu dari garis keturunan yang sama dengan Minangkabau.

Karena khawatir Belanda segera datang ke Tanah Minangkabau, Raffles lekas-lekas berlayar ke Padang lalu pergi ke Bukittinggi untuk menandatangani perjanjian dengan pemerintah Minangkabau saat itu. Kerajaan Pagaruyung sepakat menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat pusat kekuasaan Minangkabau tetap di tanah Sumatra. Pada tahun 1818, Raffles kembali ke Tanah Minangkabau dan pulang dengan kecewa karena ternyata raja telah diganti. Kerajaan yang lama pun diubah menjadi perkebunan. Penyebabnya adalah peperangan Kaum Adat dengan Ulama. Raffles menyebut ini Perang Padri, yang berasal dari kata Portugis misionaris "padre".

Sosok paling terkemuka dalam Perang Padri ialah Tuanku Imam Bonjol. Perang pecah setelah ia menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol bersama ulama ingin membenahi adat-istiadat setempat, terutama menghapus tradisi yang melanggar ajaran Islam semisal sabung ayam, mengunyah sirih, dan minum tuak. Misi ambisius ini ditentang oleh rakyat Minangkabau, sebab meskipun sangat taat memeluk Islam, mereka pun bangga sekali akan tradisi dan adat.

Hampir semua anggota kerajaan Pagaruyung tewas pada rentang tahun 1815 sampai 1818⁴. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Raffles kemudian merancang strategi politik baru untuk kepulauan di dekat Sumatra, yaitu Singapura. Sejak itu, Kaum Adat mengundang Belanda ke Tanah Minangkabau untuk memerangi Kaum Padri. Setelah tujuh belas tahun berperang, akhirnya Imam Bonjol dibekuk lalu dibuang ke pengasingan sampai meninggal pada usia 92 tahun.

Selama perang inilah, karakter dinamis orang Minang mulai muncul. Kelompok ulama bergabung dengan masyarakat antikolonialisme dan melawan penjajah. Marsden menjelaskan

dalam bukunya bahwa Tanah Minangkabau menjadi pusat Islam kedua secara resmi di kawasan Timur, setelah Mekkah. Tanah ini pun dijadikan pusat pembelajaran agama Islam.

Pada tahun 1920, pergerakan Muhammadiyah lahir di Tanah Minangkabau. Gerakan ini semula fokus pada aktivitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan dukungan masyarakat Minangkabau, Muhammadiyah berkembang menjadi kekuatan besar.

Orang Minangkabau dikenal karena semangat antikolonialismenya, serta terdiri atas muslim konservatif yang berpendidikan tinggi, kemudian orang Minang diterima sebagai pemimpin ketika Indonesia merdeka. Dari empat orang yang dianggap perintis kemerdekaan Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Amir Syarifuddin, tiga di antaranya dari etnis Minangkabau. Ketika Yogyakarta berstatus ibu kota, bahkan Belanda memandang para pemimpin bangsa Indonesia di Yogya sebagai pemerintahan Minangkabau. Lalu ketika Yogyakarta diduduki Belanda, kota Bukittinggi menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Belanda baru berhasil menduduki Bukittinggi pada tahun 1948.

2. Budaya Minangkabau

Awalnya, menurut sejarah tradisi Minang, hanya ada satu Nur Muhammad yang menjadi media Allah menciptakan alam semesta dan manusia pertama⁵. Dalam kesatuan transendental dan universal inilah alam Minangkabau berada, dimulai dengan mendaratnya leluhur pertama di Gunung Marapi, yang saat itu dikelilingi air. Sejarah Minangkabau berawal sebelum air surut, sebelum permukaan bumi naik tajam, sebelum penghuninya bertambah. Ketika air

surut, kediaman-kediaman baru dibangun, dan akhirnya kawasan tiga luhak⁶, yang menjadi tempat lahirnya suku Minangkabau, pun berpenduduk.

Suku Minangkabau terus melakukan penjelajahan wilayah dan mendirikan kediaman baru di luar tanah kelahiran. Kawasan-kawasan baru ini disebut rantau. Secara geografis, rantau bertambah luas seiring dengan peningkatan jumlah orang Minang. Tanah kelahiran yang statis dan rantau yang terus meluas sama-sama menjadi bagian alam Minangkabau.

Alam Minangkabau sendiri merupakan himpunan beberapa kawasan yang lebih kecil, disebut nagari. Masing-masing nagari membentuk suatu komunitas politik "mandiri" yang memiliki balai, masjid, jalan raya, dan tempat pemandian umum sendiri. Dalam teori adat Minangkabau, suatu nagari dipandang sebagai jenis kediaman yang paling berkembang. Batasnya jelas dan wilayah komunikasinya diakui.⁷ Semua nagari menganut nilai dan norma adat yang sama, namun pada saat yang bersamaan, nagari merupakan alam yang lebih kecil dan memandang sesama nagari sebagai rantaunya, sehingga otomatis menjadi kawasan yang perlu ditelusuri. Dalam konteks ini, merantau secara sederhana dapat diartikan meninggalkan nagari sendiri.

Cara pandang Minangkabau meliputi tradisi politik asli para penghulu dan raja.⁸ Penghulu bertindak sebagai pimpinan beberapa keluarga matrilineal, dan bertugas menangani urusan-urusan dalam nagari. Dikotomi sistem politik ini dijembatani oleh tradisi asal Koto Piliang dan Bodi Chaniago yang berdampingan. Koto Piliang menganut kedudukan penghulu secara hierarkis sedangkan Bodi Chaniago memandang setara semua penghulu. Lain dengan tanah asal, rantau nagari dipimpin oleh radja, perwakilan kerajaan yang tinggal di tanah kelahiran. Namun

fungsi terpenting rantau bukanlah tumpuan keluarga kerajaan melainkan sebagai gerbang masuk dan keluar dunia luar.

Sejarah Minangkabau memperlihatkan peran rantau selaku sumber pengaruh luar, yang dikombinasikan dengan alam yang sudah ada. Pengaruh demikian itu paling signifikan ketika mem-baur dengan potensi-potensi yang telah ada di alam sendiri. Penggabungan kerajaan di alam asli, yang berdasarkan kepemimpinan penghulu, dipermudah oleh tradisi hierarki lama di struktur politik tertentu sehingga unsur baru mudah berbaur dengan sistem lama. Meresapnya nilai-nilai Islam dalam sistem keyakinan dan struktur sosial Minangkabau tidak menggantikan adat. Yang terjadi justru memperkaya alam Minangkabau. Melalui eksplorasi berkesinambungan, potensi-potensi alam terkuak, dan unsur luar pun berbaur. Namun unsur-unsur asli tetap terlihat, bukan sejenis asimilasi total yang menghapus sepenuhnya elemen-elemen lama.

Dalam konteks tradisi, unsur baru dapat diterima apabila memenuhi persyaratan tertentu. Unsur tersebut harus diperkenalkan melalui pola hierarki sosial yang telah mapan, dan akhirnya dimufakati penghulu.⁹ Ini memastikan unsur baru itu tidak menyebabkan perubahan pada landasan utama adat. Lebih jauh lagi, inovasi ini harus masuk akal dan patut secara moral. Contohnya, membuka sawah di pekarangan orang lain masuk akal, tapi apakah hal itu patut? Membuka sawah di puncak gunung memang patut, namun mungkinkah itu dilakukan? Apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, unsur baru bisa saja mengganggu harmoni sosial dan alam tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Snouck Hurgronje adalah cendekiawan Belanda pertama yang melihat bahwa muslim di Indonesia, seperti halnya umat muslim

di negara lain, terpengaruh adat dalam aktivitas keberagamaan. Nilai-nilai Islam berbaur dengan elemen lain di kehidupan sosial dan hukum mereka. Oleh sebab itu, muslim Indonesia berbeda dengan sesamanya di Timur Tengah. Hukum Islam yang tegas harus beradaptasi dengan adat istiadat di mana pun. Hanya dalam hukum perkawinan dan kekeluargaan, Al-Qur'an menjadi acuan utama. Dalam kedua hal ini, tidak ada aturan adat yang memengaruhi sebagaimana dalam berbagai urusan lain.¹⁰

Penerimaan Islam di wilayah Minangkabau merupakan ilustrasi bagaimana suatu komunitas adat menyerap unsur baru. Alam Minangkabau dipandang sebagai wilayah harmonis tempat berpadunya Islam dan adat. Keharmonisan ini tampak dalam konsep tiga raja Minangkabau, yakni Raja Adat, Raja Agama, dan Raja Dunia. Di tingkat nagari pun demikian, para ahli agama dilibatkan dalam hierarki adat. Ciri khas keharmonisan tadi biasanya berupa pepatah adat berbunyi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Adat menjaga kerukunan masyarakat, sedangkan hukum agama untuk menyeimbangkan diri dengan tatanan kosmis. Kesatuan nagari dilambangkan dengan keberadaan satu balai dan satu masjid. Yang pertama mewakili adat, sedangkan yang kedua merupakan simbol agama.

3. Krisis Minangkabau pada Abad ke-19

"Pembaruan" Islam pertama di Minangkabau berlangsung sekitar tahun 1784, sewaktu surau Shattariya Tuanku Nan Tua, di Kabupaten Agam, mulai berfungsi sebagai sumber utama pengajaran yurisprudensi Islam yang ditegakkan dalam konteks penanganan konflik menyangkut perdagangan dan pertahanan di desa-desa yang bertetangga, sehingga pada tahun 1790-an dikenal dengan sebutan "pemimpin para pedagang".¹¹ Konsep alam secara tradisional selaku harmoni

di antara kontradiksi ini menghadapi tantangan besar di awal abad kesembilan belas dari gerakan reformasi agama konservatif, Padri. Ini digagas oleh tiga haji Minangkabau, yang terpengaruh Wahabi di Arab, golongan ini menolak usul keseimbangan adat dengan Islam. Padri lebih menekankan pada perilaku yang benar dari sudut pandang agama daripada "membersihkan hati". Menurut mereka, syarak atau penegakan hukum agama harus diprioritaskan ketimbang aturan dan norma lainnya. Gerakan religius yang militan ini mengancam praktik adat karena bertentangan dengan syarak. Karena itulah keseluruhan konsep alam terancam dan meletuslah perang sipil yang dahsyat. Konflik terjadi tidak hanya antara penganut agama yang fanatik dan pemegang aturan lama, melainkan juga antara pemegang prinsip sudut pandang dunia secara total (sudut pandang universal) dan yang berpandangan relatif (sudut pandang lokal).¹²

Terlepas dari bentrokan sosial yang meletupkan konflik hebat ini, Minangkabau secara bertahap pulih dari krisis. Bertambahnya pengikut Padri menyebabkan sikap mereka melunak dan bersedia berkompromi. Proses ini dipercepat karena intervensi Belanda pada tahun 1821. Sementara itu, pengaruh luar pun berkurang karena penganut aliran Wahabi di Arab mulai menarik diri.¹³

Sewaktu perang berakhir di tahun 1837, jelaslah Padri tidak mengubah banyak hal dalam struktur politik dan sosial Minangkabau, walaupun gerakan mereka mengusung penegakan agama dan menerapkannya dalam sistem sosial.¹⁴ Rumusan adat yang baru diperkenalkan dengan penekanan kontras antara adat jahiliah, yakni yang belum tercerahkan dan sinkretis, dan adat islamiyah, yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Kategori adat tertinggi, "adat yang benar adalah benar-benar adat", kini diartikan sebagai Al-Qur'an dan hadits. Aforisme baru mengenai kaitan adat dan agama pun dipopulerkan, *adat basandi*

syarak, sarak basandi Kitabullah. Lebih rendahnya kedudukan adat daripada hukum agama ditunjukkan dengan “syarak merancang, adat melaksanakan.” Idealnya, adat menjadi sarana melaksanakan ajaran agama secara benar. Selain rumusan baru ini, yang merupakan konsekuensi signifikan lain Perang Padri adalah menguatnya posisi guru agama dan makin banyaknya jaringan sekolah agama.¹⁵

Namun, akhir perang sipil itu berakibat penaklukan alam Minangkabau oleh Belanda. Kerajaan yang sakral diganti dengan gubernur Belanda yang berpengaruh, lalu munculah organisasi supranagari yang fungsional. Dewan nagari secara teoretis tetap menjadi pusat kekuatan nagari masing-masing, namun dinaungi kantor tuanku laras, yang bertindak sebagai kepala adat dan administrasi suatu federasi nagari. Bukan lagi balai, melainkan tuanku laras-lah yang mengambil keputusan terkait adat dan persoalan administratif. Pada tahun 1870-an, usikan lebih jauh terhadap tradisi penghulu timbul. Saat itu diberlakukan hukum kriminal Barat yang menghapus kekuatan balai sebagai penegak hukum nagari. Pengikisan otoritas balai dan penurunan kehormatan penghulu diperkuat dengan tugas-tugas tak terduga yang diserahkan pada penghulu selaku penyelia rodi kompeni.¹⁶

Dijajahnya Minangkabau melemahkan sistem politik tradisional dan mengakibatkan krisis kepercayaan diri. Menurunnya pamor penghulu dipandang sebagai cerminan melemahnya sisi sosial dan terjadinya pergeseran paradigma pada Minangkabau. Tak lama setelah berakhirnya Perang Padri, Belanda memonopoli pembelian kopi dan melaksanakan sistem kerja paksa. Hal ini mengakibatkan situasi yang tak tertanggungkan. Pada masa itu, Minangkabau mengalami periode rodi dan tidak lagi mengutamakan adat.

Sepanjang periode tersebut, pilar masyarakat Minangkabau lain yakni agama, juga mengalami krisis. Pada tahun 1850-an, persaudaraan spiritual yang berorientasi ortodoks (tarekat), Naqsyabandiyah, mulai menggeser tarekat yang lama, terutama Syatariah, yang dianggap bid'ah. Naqsyabandiyah berlandaskan pemahaman kesatuan kognitif dengan Tuhan, yang berkebalikan dengan kesatuan eksistensial yang diajarkan di sekolah-sekolah lain, serta pentingnya perilaku keagamaan di luar. Memasuki abad ke-20, gerakan religius lain muncul. Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama dan imam Minangkabau yang juga mengajarkan mazhab Syafi'i di Masjidil Haram (Mekkah), menyerang doktrin religius yang sudah ada dan hukum waris adat matrilineal. Serangan terhadap hukum waris, yang dipandang bertolak belakang dengan ajaran agama, masih berlangsung sampai masa kini sebagai isu sosial dan hukum utama yang tak berkesudahan. Perselisihan Ahmad Khatib dengan tarekat-tarekat, terutama Naqsyabandiyah, menandakan permulaan konflik agama di Minangkabau selama lebih dari dua dekade.¹⁷

Pada awal abad ke-20, fondasi masyarakat Minangkabau diserang dari segala penjuru. Dari luar, kekuatan politik dan ekonomi Belanda semakin mencengkeram, sedangkan di dalam, gerakan pembaruan religius mengencang. Orang mulai mempertanyakan kemampuan masyarakat untuk menghadapi problematika yang rumit ini. Sepanjang periode ini, selalu timbul perasaan bahwa tatanan lama menjadi terganggu.

Selama situasi yang kritis tersebut, pemerintah memberlakukan aturan pajak moneter baru, tepatnya pada tahun 1908. Penurunan produksi kopi sejak perempat akhir abad ke-19 menyebabkan pemerintah menghapus monopoli kopi dan menggantinya dengan pendapatan dari pungutan pajak. Dari kacamata ekonomi murni, kebijakan baru ini menguntungkan bagi rakyat, sebab mereka kini

dapat menjual kopi ke pasar terbuka dengan harga yang relatif lebih tinggi. Namun ternyata yang terjadi tidak demikian, sebab rakyat merasa dicurangi dan dipermalukan oleh aturan baru itu. Di mata mereka, pemerintah Belanda secara terang-terangan mengklaim diri sebagai "penguasa", bukan semata sebagai "pelindung" Minangkabau. Ketetapan Plakat Pandjang yang dikeluarkan oleh Belanda semasa Perang Padri menjanjikan tak ada pungutan pajak secara langsung di Minangkabau. Dipandu oleh penghulu, yang tidak senang karena kekuasaan mereka tergerus, juga para pemimpin tarekat, yang menentang doktrin agama, ketidaksetujuan terhadap aturan-aturan baru yang semula pasif berkembang menjadi pemberontakan setempat. Para pengajar tarekat memberikan landasan religius bagi pemberontakan yang menyebar di berbagai tempat ini. Legitimasi pemerintah dipertanyakan sebab tidak berdasarkan konsensus rakyat (*sakato alam*). Pemerintah sendiri disebut institusi kafir yang menistakan agama.

Akan tetapi pemberontakan di berbagai daerah tersebut lebih tepat disebut reaksi defensif untuk mencegah pelanggaran aturan lama lebih jauh lagi. Sasarannya adalah kekuatan tak terpetakan yang seketika mendominasi kehidupan rakyat. Dengan tindakan represif, pemerintah menekan perlawanan itu dan memaksakan program pemungutan pajak.¹⁸

4. Peranan Rantau

Cerita sejarah Minangkabau (*tambo*) menunjukkan bagian penting yang diperankan rantau dalam perkembangan masyarakat. Lembaga kerajaan dan agama Islam merupakan dua unsur utama yang berasal dari rantau, namun kemudian melebur menjadi satu. Rentetan gerakan pembaruan agama, mulai dari Padri sampai ka-

lantan modern, diawali oleh orang-orang yang pernah mendatangi pusat-pusat keislaman di luar Minangkabau. Dorongan yang mengacu pada konsep kemajuan Barat memperoleh dukungan terutama dari para pedagang, warga sipil, dan guru-guru sekolah yang bertempat tinggal di kota-kota yang baru dibangun. Perkembangan edukasi dan politik di Minangkabau abad kedua puluh sangat terpengaruh oleh intelektual perantau, baik yang mengenyam pendidikan islami maupun Barat.¹⁹

Peran penting rantau dapat dijelaskan dengan mempelajari kedudukannya dalam konsep keminangkabauan beserta struktur sosialnya. Rantau bukanlah sekadar sebagai gerbang untuk memasuki dunia dengan unsur-unsur baru melainkan juga tempat orang-orang yang tidak puas akan komunitas di dalam Minangkabau dan kemudian menuju dunia luar di mana mereka memperoleh wadah yang lebih sesuai. Rantau bertindak sebagai media yang meredakan ketegangan internal akibat ketidaksepahaman mengenai konsep Minangkabau terkait hubungan individu dengan masyarakat di satu pihak serta tuntutan struktur sosial matrilineal di pihak lain.²⁰

Individu dan masyarakat merupakan dua kesatuan namun tak terpisahkan menurut adat. Hubungan keduanya ditentukan oleh siklus otoritas dan kewajiban tempat seajarnya objek dan sumber utama otoritas tersebut. Kemenakan yang melambangkan individu harus mengakui otoritas mamak (paman) nya, yang kemudian mengandalkan penghulu. Penghulu harus mendasarkan penilaiannya pada mufakat, yang mencerminkan keinginan masyarakat dan kebijakan komunal. Menurut tatanan hierarki otoritas ini, individu dikendalikan penuh oleh masyarakat. Akan tetapi pepatah adat mengungkapkan bahwa sebenarnya kemenakan bukan hanya objek, melainkan sumber otoritas utama pula. Dari luar penghulu menjadi pe-

nguasa, namun sebenarnya ia hanya bertindak untuk melayani kemenakan. Kekuatan penghulu tidak berdasarkan atribut pribadi tetapi menjadi mulia karena dimuliakan oleh kemenakannya. Otoritasnya berlandaskan *sakato alam*, hasil persetujuan bersama seluruh rakyat.

Fondasi sistem sosial Minangkabau terletak pada jaringan matrilineal mamak kemenakan. Pusatnya adalah sosok ibu, orang paling penting sehubungan dengan rumah komunal yang diwarisi dan properti yang tidak dapat dicabut. Sebagai kepala keluarga, mamak biasanya adalah pria tertua yang bertanggung jawab atas pengelolaan properti warisan dan kesejahteraan kemenakannya. Ia juga bertugas sebagai wakil keluarga dalam urusan suku. Kemenakan tentu saja harus menganggap mamak sebagai "raja" (*baradjo kamamak*), ia harus minta izin mamak kapan pun pergi dan memberitahunya ketika kembali. Dalam hubungan antarsuku, kemenakan mematuhi mamak seluruh suku, yakni penghulu. Seorang penghulu bertugas sebagai mamak kepala di sukunya sendiri dan pemimpin yang diakui di seluruh unit politik matrilineal. Ia melambangkan kejayaan dan harmoni komunitas adat di bawah yurisdiksinya²¹.

Sejak dulu Minangkabau mengesankan karena prinsip adat mereka. Kehidupan etnis ini pun didominasi jaringan sosial adat yang luas dan aturan adat yang rumit. Para pelaksana adat bertindak baik sebagai pemegang kekuasaan maupun penjaga prinsip adat yang sah. Dalam permasalahan adat yang intensif, konsep rantau memberikan wadah filosofis untuk menoleransi nilai-nilai tambahan. Secara taktis nagari mengakui "rantau internal"-nya, yaitu tempat-tempat rangkaian nilai tambahan dan berbeda dapat dikemukakan dengan terbuka.

Salah satu contoh khas Minangkabau adalah lapau, kedai kopi pedesaan, yang secara tradisional merupakan tempat orang

berdiskusi dan mengkritik anggota balai serta gagasan mereka. Lapau yang sering didatangi orang dari nagari lain dapat berfungsi positif sebagai sumber perubahan dalam nagari. Segi negatifnya, lapau menjadi arena orang Minang berpendapat sesuka hati tanpa terkendali. Oleh karena itu, lapau merupakan wadah tempat penentang dan pendukung perubahan yang aktif untuk memperoleh rantau internal yang sama.

Berbagai jenis rantau internal kadang diubah menjadi lembaga-lembaga yang menantang seluruh sistem. Lembaga oposisi ini membangun madrasah baru, atau sekolah agama lain terkait pergerakan reformasi agama atau dari rekanan sukarela di zaman modern. Rekanan sukarela, yang bertentangan dengan nilai adat dan status, menawarkan lembaga alternatif untuk mengemukakan pemikiran dan harapan individu. Keanggotaan dan posisinya bukan bergantung pada status adat melainkan pada pilihan dan tindakan pribadi.

Rekanan sukarela memberi para anggotanya dorongan berpartisipasi dan kepuasan, yang mungkin tidak didapatkan dari organisasi adat yang ada beserta hierarkinya. Sepanjang sejarah modern, rekanan sukarela ini kerap menyisihkan kekuatan dewan nagari tradisional dan terkadang mengambil inisiatif darinya.²²

Merantau disebut demikian karena berdasarkan filosofi adat, merupakan cara untuk memenuhi aturan dasar yang mengharuskan individu menghadapi luasnya dunia. Dengan meninggalkan nagari atau alam Minangkabau, kaum muda mempelajari kedudukannya sendiri dalam masyarakat dan relasinya dengan orang lain. Urang siak (pelajar agama) merupakan contoh khas tradisional orang muda yang pergi merantau untuk mencari ilmu. Ia bepergian dari satu sekolah agama ke yang lain untuk menyempurnakan pengetahuan. Urang siak memelihara

nguasai, namun sebenarnya ia hanya bertindak untuk melayani kemenakan. Kekuatan penghulu tidak berdasarkan atribut pribadi tetapi menjadi mulia karena dimuliakan oleh kemenakannya. Otoritasnya berlandaskan *sakato alam*, hasil persetujuan bersama seluruh rakyat.

Fondasi sistem sosial Minangkabau terletak pada jaringan matrilineal mamak kemenakan. Pusatnya adalah sosok ibu, orang paling penting sehubungan dengan rumah komunal yang diwarisi dan properti yang tidak dapat dicabut. Sebagai kepala keluarga, mamak biasanya adalah pria tertua yang bertanggung jawab atas pengelolaan properti warisan dan kesejahteraan kemenakannya. Ia juga bertugas sebagai wakil keluarga dalam urusan suku. Kemenakan tentu saja harus menganggap mamak sebagai "raja" (*baradjo kamamak*), ia harus minta izin mamak kapan pun pergi dan memberitahunya ketika kembali. Dalam hubungan antarsuku, kemenakan mematuhi mamak seluruh suku, yakni penghulu. Seorang penghulu bertugas sebagai mamak kepala di sukunya sendiri dan pemimpin yang diakui di seluruh unit politik matrilineal. Ia melambangkan kejayaan dan harmoni komunitas adat di bawah yurisdiksinya²¹.

Sejak dulu Minangkabau mengesankan karena prinsip adat mereka. Kehidupan etnis ini pun didominasi jaringan sosial adat yang luas dan aturan adat yang rumit. Para pelaksana adat bertindak baik sebagai pemegang kekuasaan maupun penjaga prinsip adat yang sah. Dalam permasalahan adat yang intensif, konsep rantau memberikan wadah filosofis untuk menoleransi nilai-nilai tambahan. Secara taktis nagari mengakui "rantau internal"-nya, yaitu tempat-tempat rangkaian nilai tambahan dan berbeda dapat dikemukakan dengan terbuka.

Salah satu contoh khas Minangkabau adalah lapau, kedai kopi pedesaan, yang secara tradisional merupakan tempat orang

berdiskusi dan mengkritik anggota balai serta gagasan mereka. Lapau yang sering didatangi orang dari nagari lain dapat berfungsi positif sebagai sumber perubahan dalam nagari. Segi negatifnya, lapau menjadi arena orang Minang berpendapat sesuka hati tanpa terkendali. Oleh karena itu, lapau merupakan wadah tempat penentang dan pendukung perubahan yang aktif untuk memperoleh rantau internal yang sama.

Berbagai jenis rantau internal kadang diubah menjadi lembaga-lembaga yang menantang seluruh sistem. Lembaga oposisi ini membangun madrasah baru, atau sekolah agama lain terkait pergerakan reformasi agama atau dari rekanan sukarela di zaman modern. Rekanan sukarela, yang bertentangan dengan nilai adat dan status, menawarkan lembaga alternatif untuk mengemukakan pemikiran dan harapan individu. Keanggotaan dan posisinya bukan bergantung pada status adat melainkan pada pilihan dan tindakan pribadi.

Rekanan sukarela memberi para anggotanya dorongan berpartisipasi dan kepuasan, yang mungkin tidak didapatkan dari organisasi adat yang ada beserta hierarkinya. Sepanjang sejarah modern, rekanan sukarela ini kerap menyisihkan kekuatan dewan nagari tradisional dan terkadang mengambil inisiatif darinya.²²

Merantau disebut demikian karena berdasarkan filosofi adat, merupakan cara untuk memenuhi aturan dasar yang mengharuskan individu menghadapi luasnya dunia. Dengan meninggalkan nagari atau alam Minangkabau, kaum muda mempelajari kedudukannya sendiri dalam masyarakat dan relasinya dengan orang lain. Urang siak (pelajar agama) merupakan contoh khas tradisional orang muda yang pergi merantau untuk mencari ilmu. Ia bepergian dari satu sekolah agama ke yang lain untuk menyempurnakan pengetahuan. Urang siak memelihara

hubungan dengan madrasah dan nagari yang mengitarinya. Pelajar dan komunitas secara luas saling terikat oleh kebutuhan dan kewajiban yang sama. Anggota madrasah memberikan pengetahuan agama dasar dan melaksanakan ibadah untuk orang nagari, namun sekaligus menjadi saluran komunikasi antarnagari dengan perjalanan mereka. Komunitas sendiri secara umum mendukung urang siak dengan makanan dan keperluan lainnya. Saat pendidikan agamanya dirasa telah lengkap, urang siak diharapkan menjadi guru agama di nagari asalnya.²³

Perubahan ekonomi dan perkembangan sistem sekolah agama di awal abad kedua puluh pun mengubah sifat dasar urang siak. Ia bukan lagi pelajar agama yang berkeliling dan menjalani hidup berkat bantuan masyarakat, namun menjadi pelajar yang terikat dengan satu madrasah "modern" tertentu. Keluarganya lah yang membiayai pendidikannya. Meskipun demikian, tujuan meninggalkan nagari untuk mencari ilmu masih sama. Pembangunan sekolah-sekolah jenis baru di luar, seperti sekolah pemerintahan yang sekuler di Jawa, dikombinasikan dengan makin terbukanya peluang untuk berpergian ke tempat yang jauh seperti Timur Tengah mendorong orang muda Minangkabau untuk merantau. Hal ini berarti inti peran rantau sebagai pusat edukasi kaum muda tak berubah.

Rantau dipandang sebagai wilayah asing yang mengharuskan seorang muda dari Minangkabau menyesuaikan diri. Kesadaran akan dunia luar menguntungkan orang muda tersebut dalam perkembangan pribadinya sebagai anggota masyarakat yang dewasa. Bukan hanya itu saja, karena di saat bersamaan, ia diharapkan bertindak selaku informan dan guru yang memberdayakan komunitasnya guna mengadaptasi sisi baik yang didapatnya dari rantau dan mengikis sisi-sisi buruk yang telah ada dalam masyarakat.

Satu alasan ketidakseimbangan perkembangan nagari Minangkabau adalah jumlah perantau yang berpindah-pindah antara nagari tertentu dan rantau. Faktor ekonomi merupakan penentu yang penting terhadap jumlah perantau. Nagari yang lebih makmur lebih sedikit perantainya, dan berkembang di rantau. Nagari-nagari ini pun relatif berhasil memelihara kepemilikan tanah dan klasifikasi sosial yang tradisional.

Nagari dipengaruhi gagasan-gagasan baru yang dibawa perantau ketika kembali, baik oleh partisipan gerakan modern Islam maupun melalui peningkatan anak yang menuntut ilmu di sekolah Barat. Terlepas dari masalah ekonomi keuangan, pengaruh ekonomi dapat melemahkan kewenangan penghulu dengan memperbesar jumlah elite di pedesaan.

Tanpa memandang kedudukannya di dalam masyarakat Minangkabau, "merantau" juga mencerminkan kesulitan personal. Seorang pemuda kerap kali pergi merantau karena merasa atau dikondisikan untuk merasa tidak punya tempat di komunitasnya. Ia berharap ketika kembali kelak, ia mempunyai tempat yang layak di masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga matrilineal serta istri dan anaknya dapat mendorong pria dewasa pergi mencari nafkah di perantauan. Ketika ia kembali, ia diharapkan melunasi hutang-hutang keluarga dan meningkatkan kemegahan keluarga.

Nagari-nagari, idealnya, dapat memetik keuntungan dari rantau. Uang dari rantau dapat meningkatkan prestise dan properti nagari. Gagasan perantau dapat menjadi stimulan perkembangan filosofinya. Untuk hal ini perantau harus memastikan nagari asalnya adalah pewaris utama pengalaman-pengalamannya di rantau. Ini sesuai dengan tradisi historis menurut tambo, di mana salah satu pelaksana adat memberikan fondasi adat Minangkabau sekembalinya dari rantau.²⁴

Gerakan agama yang berkesinambungan, yang memaksakan peninjauan nilai-nilai kultural alam, dilaksanakan oleh perantau yang mengenyam pendidikan di pusat-pusat Islam dunia. Keunggulan model Barat dalam kemajuan mendorong perantau yang berlatar belakang pendidikan Barat ini untuk mengharapkan hal yang sama terjadi di Minangkabau. Pengalaman di luar negeri dan kesadaran akan ide-ide yang berkembang di sana membantu perantau merumuskan makna baru dan lebih luas dari konsep tradisional alam Minangkabau. Perantau memperkenalkan gabungan ide dengan keyakinan dan takdir pada orang-orang di luar Minangkabau. Meskipun penekanannya berbeda, gerakan pembaruan Islam yang terus-menerus, partai politik, dan organisasi pendidikan menegaskan pentingnya menyadari keberadaan persaudaraan Islam yang lebih besar. Dengan konsep kesatuan yang lebih luas ini, perantau mengancam menghapus pemikiran adat yang ada mengenai alam yang bertambah besar secara geografis dan juga melemahkan sifat memusat pada alam Minangkabau yang sudah turun-temurun.²⁵

- 1 John Keay, *Indonesia from Sabang to Merauke* (London: Boxtree, 1995), hlm. 79–94.
- 2 William Marsden, *History of Sumatra*, (London: Boxtree, 1783). –cek catatan kaki
- 3 Ibid.
- 4 Amran Rusli, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, Bab 1, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- 5 Salah satu contoh buku mengenai sejarah tradisional Minangkabau adalah Datuk Sangguno Diradjo, *Mustika Adat Alam Minangkabau* (Jakarta: Kementerian P&K, 1955).
- 6 Tiga *luhak* yang disebutkan dalam teks ini adalah tiga wilayah utama tanah kelahiran: Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota, yang secara keseluruhan disebut *luhak nan tigo*.
- 7 A. M. Dt. Maruhum Batuah, & Dt. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Minangkabau* (Djakarta: Pusaka Aseli, 1956), hlm. 58–60.
- 8 P.E. de Josselyn de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structures in Indonesia* (Jakarta: Bhatara, 1960), hlm. 97–116.

- 9 Datuk Sangguno, *Mustiko Adat*, Bab 1–4.
- 10 Harry J. Benda, "Christiaan Snouck Hurgonje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia" dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, & Yasmin Hussain, *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1985), hlm. 338.
- 11 Christine Dobbin, "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Paderi Movement 1784–1830", dalam majalah *Indonesia*, No. 23 April 1977, hlm. 14.
- 12 Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927–1933* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971), hlm. 5.
- 13 Ibid., hlm. 6.
- 14 M. Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat 1803–1838* (Jakarta, Balai Pustaka, 1954), hlm. 107.
- 15 Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 7.
- 16 Ibid, hlm. 8.
- 17 William R. Roff, *Islamic Movements: One or Many*. Dalam William R. Roff *Islam and The Political Economy of Meaning* (New York: Social Science Research Council, 1987).
- 18 Christine Dobbin, "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Paderi Movement 1784–1830", dalam majalah *Indonesia*, No. 23 April 1977, hlm. 31.
- 19 Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 18.
- 20 Ibid, hlm. 18.
- 21 *Penghulu* biasanya dipilih di antara kaum pria di suku *urang usali* (penduduk asli). Kadang terjadi *penghulu* yang baru diangkat masih sangat muda sehingga seorang *pemangku* dewasa dipilih untuk melakukan tugas atas namanya. Seorang *pemangku* juga diperlukan bila *penghulu* bertempat tinggal di luar nagari. Lih. Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 19.
- 22 Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hlm. 20.
- 23 Asma M. Naim & Mochtar Naim, *Bibliografi Minangkabau* (Singapore: Singapore University Press, 1975), hlm. 219.
- 24 Ibid., hlm. 228.
- 25 Taufik Abdullah, *Schools and Politics*. hlm. 21.

Bab 2

Sejarah Pergerakan Islam Modern di Minangkabau

1. Tumbuh Kembang Islam di Minangkabau

Agama Islam masuk ke wilayah Sumatra Barat (Minangkabau) diperkirakan pada abad ke-8 dan dibawa oleh para saudagar Arab dan Gujarat. Pada abad ke-13, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hal ini dipicu oleh terjalinnya hubungan dagang kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Aceh.¹

Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Islam telah masuk ke kawasan Minangkabau pada abad ke-12. Ada juga yang berpendapat pada abad ke-14. Bahkan ada yang menyimpulkan dengan berpegang pada almanak Tiongkok, bahwa sudah ditemukan satu kelompok masyarakat Arab di Sumatra Bagian Barat pada tahun 674 M. Artinya, Islam telah masuk ke daerah Minangkabau sejak tahun 674 M atau abad pertama Hijrah.² Sebaliknya, M. Justra dalam bukunya, *Minangkabau Oversight van Land, Geshiede en Volks* memastikan bahwa Islam pada tahun 1551 tidaklah berlaku di Minangkabau. Begitu juga Ray de Arito, seorang kapitan dari Malaka. Ia menyatakan bahwa tahun 1554, orang-orang Minang belum beragama.³

Di antara berbagai pendapat ahli sejarah tentang kapan masuknya Islam, yang paling bisa diterima oleh banyak pihak adalah bahwa Islam baru dikenal oleh masyarakat Minangkabau, dalam arti sebuah agama, pada sekitar tahun 1600.

William Marsden dalam bukunya, *The History of Sumatera*, mengakui betapa cepat proses menyebarnya Islam. Ketika ia mengunjungi daerah tersebut pada tahun 1778, ia heran melihat masyarakat Minangkabau telah sepenuhnya memeluk Islam, padahal dalam sebuah manuskrip tahun 1761 digambarkan bahwa masyarakat di sana kebanyakan masih menyembah berhala. Marsden menambahkan, sekalipun masyarakat Minangkabau telah memeluk Islam, takhayul serta praktik-praktik yang tidak Islami lainnya masih banyak dilakukan masyarakat Minangkabau pada masa itu.⁴

Syariat Islam seperti shalat, puasa, masih jarang dilaksanakan, bahkan masjid (surau) jarang dikunjungi kecuali oleh para pemuka agama. Hal tersebut terjadi meskipun menurut suatu pendapat, penduduk asli telah di-Islamkan oleh pedagang-pedagang Islam yang berlayar dari Malaka menyusuri Sungai Kampar dan Indragiri pada abad ke-15 dan ke-16.⁵

Pada tahun 1607-1638, kerajaan Pasai Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang sedang berada di puncak kejayaan dan bercorak Islam, menyebarluaskan pengaruhnya sampai akhirnya dapat menguasai kerajaan kecil Minangkabau.⁶ Kejayaan Islam inilah yang kemudian berkembang ke wilayah Sumatra Barat, sehingga pada akhirnya Islam dijadikan sebagai pilar kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik.⁷

Dengan demikian, agama Islam hanya terdapat di kota-kota pelabuhan yang dapat dicapai oleh para pedagang. Sedangkan perkembangannya ke daerah pedalaman berjalan agak lambat, mengingat adanya pengaruh Hinduisme yang masih kuat dan berpusat di Kerajaan Minangkabau.

2. Konsep "Kemajuan"

Peristiwa-peristiwa tragis pada 1908 menandai awal periode baru di Minangkabau. Peristiwa tersebut menimbulkan perubahan dalam bidang ekonomi dan telah meningkatkan dominasi pengaruh-pengaruh kota ke dalam nagari. Masuknya ekonomi uang dengan cepat ke nagari mulai meruntuhkan pemikiran-pemikiran tradisional nagari sebagai komunitas yang bisa dikatakan berpuas diri dalam hidup. Seiring pengenalan sistem keuangan moneter, pemerintah mengatasi sejumlah penghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghapus larangan ekspor beras dan beberapa pengendalian lain terhadap produksi beras. Di saat yang sama, jalur keluar-masuk lama di bagian Timur melalui Selat Malaka dibuka kembali. Pada tahun 1911, pemerintah memperkenalkan Sistem Kredit Rakyat, sebuah jaringan beberapa bank desa di bawah yurisdiksi wewenang adat. Pada tahun 1916 bank-bank tersebar di bagian-bagian Minangkabau yang lebih besar.⁸

Tanggapan positif kalangan Minangkabau terhadap peluang-peluang ekonomi baru ini difasilitasi oleh sistem pasar yang berputar. Sejak akhir abad kesembilan belas, setiap bagian nagari mengadakan hari pasar masing-masing satu atau dua kali seminggu. Pada hari pasar, nagari menjadi pusat ekonomi terhadap daerah di sekitarnya. Sistem pasar berputar ini diulangi pada tingkat daerah yang lebih tinggi, sehingga setiap pusat administratif tersebut selama satu kali sepekan menjadi pusat kegiatan masyarakat dari beberapa kecamatan untuk melaksanakan bisnis mereka.⁹

Tidak seperti nagari, yang muncul sebagai dampak perluasan secara bertahap dari perkampungan tua, kota-kota di bagian dalam seperti Padang Panjang, Bukittinggi (Fort De Kock), Batu Sangkar (Fort Van Der Capellen) dan Payakumbuh didirikan oleh Belanda untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu.

Kota-kota ini pada awalnya dibangun sebagai benteng-benteng militer selama Perang Padri, kemudian menjadi gudang pengiriman kopi serta pusat-pusat ekonomi dan administratif umum daerah-daerah tersebut. Kota-kota di bagian dalam dapat dianggap sebagai rantau menurut masyarakat di sekitar nagari yang tertarik pada kota-kota tersebut. Para penduduk kota yang bukan warga asli kota itu sendiri disebut perantau dan berada di bawah yurisdiksi penghulu dagang yang bertindak sebagai pemimpin bagi komunitas adat sementara mereka.

Perantau adalah orang-orang yang biasanya meninggalkan nagari mereka dan melakukan perjalanan menuju rantau. Namun tidak seperti kebiasaan di masa lalu, mereka sekarang umumnya menetap di rantau dan membangun rumah tangga di sana.

Meskipun ada tarikan kuat dari keluarga pihak wanita, berdasarkan rumah dan tanah bersama, kecenderungan ini menempatkan kepentingan yang lebih besar pada keluarga inti yang terbangun di antara perantau kota. Proses tersebut cenderung melemahkan hubungan paman ke kemenakan laki-laki dari garis ibu dan merupakan aspek penting dari perkembangan sosial Minangkabau di abad kedua puluh. Dalam keluarga inti rantau, sang ayah perlahan-lahan mulai ikut memikul beberapa fungsi yang dahulu dilakukan oleh saudara laki-laki istrinya (mamak), yang mempunyai tanggung jawab secara tradisi untuk menjaga anak-anak.¹⁰

Di kota-kota ini pula awalnya terjadi perkembangan yang lambat menuju penyesuaian dengan situasi baru yang mulai timbul. Sejak pertengahan abad kesembilan belas, pemerintah Belanda menyelenggarakan sebuah sistem sekolah yang dirancang untuk melatih para pegawai pemerintahan yang lebih rendah dan golongan di bawahnya untuk menghapus tuna aksara. Di

ibu kota-ibu kota kabupaten, pemerintah membangun sekolah-sekolah berbahasa daerah, yang disebut sebagai sekolah-sekolah kelas-dua. Di Padang dan Bukittinggi, dua kota terbesar, sekolah-sekolah Eropa didirikan.

Kweekschool, sebuah institut pelatihan guru-guru, dibuka di Bukittinggi pada pertengahan tahun 1850. Di akhir abad kesembilan belas, sekolah yang populer dengan sebutan Sekolah Radja ini adalah institut pendidikan paling penting di kawasan itu. Banyak masyarakat Minangkabau modern lulus dari institut tersebut. Sepanjang akhir abad kesembilan belas dan sepuluh tahun pertama abad kedua puluh, sistem pendidikan pemerintahan di daerah-daerah terpencil berkembang dengan sangat lambat. Kecurigaan-kecurigaan yang beredar tentang keinginan pemerintahan kafir serta fakta bahwa pendirian sekolah-sekolah itu sepenuhnya bergantung pada inisiatif pemimpin-pemimpin nagari dan tuanku laras menjadi penghalang dalam perkembangan pendidikan sejak semula. Namun di awal 1910 sistem pendidikan meluas dengan pesat setelah diperkenalkannya sekolah-sekolah yang disebut *volkschool* atau sekolah rakyat. Ini merupakan sekolah dasar tiga-tahun yang berada langsung di bawah kendali pemerintah namun dibiayai oleh komunitas nagari.

Beberapa nagari, terutama Kota Gadang (dekat Bukittinggi), menghasilkan banyak guru sekolah dan pegawai pemerintahan. Pada tahun 1911, Kota Gadang melalui pengumpulan biaya pendidikan sendiri mampu mengirimkan dua pelajarnya ke Belanda untuk melanjutkan studi dan tiga tahun kemudian nagari itu mempunyai *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) atau Sekolah Belanda-Pribumi.¹¹ Kesadaran ini menciptakan kondisi-kondisi baru di Minangkabau yang dimulai di Padang, ibu kota provinsi. Di pengujung abad kesembilan belas, kaum

bangsawan dan karyawan-karyawan pribumi mulai menyerap gaya hidup baru, ditunjukkan dengan adanya klub-klub dan koran bergaya Belanda. Mereka menyebarkan gagasan mengenai kemajuan dan modernitas.

Insoelinde, yang mulai dipublikasikan pada 1901 sebagai jurnal untuk para guru dan pegawai pribumi, adalah media pertama yang menyuarakan tentang "kemajuan". Media tersebut memiliki koresponden-koresponden "Indies" yang merupakan orang-orang berpikiran maju. "Lihatlah Jepang," salah satu penulis menyatakan, "Selama tiga puluh tahun negara itu berkembang pesat, kini negara tersebut kaya raya dan masyarakatnya berpendidikan." Generasi awal guru-guru Barat berpendidikan, yang bergabung dalam kelompok penulis utama jurnal tersebut, memercayai bahwa jalan untuk mencapai kemajuan adalah melalui pembangunan sistem sekolah modern. Mereka bersikeras bahwa pendidikan seharusnya tidak lagi berdasarkan pada sekolah-sekolah agama yang ketinggalan zaman dan bahwa guru-guru sebaiknya tidak dipimpin oleh para guru agama yang masih berpengaruh.¹²

Gagasan mengenai "kemajuan" ini ditafsirkan ulang di awal 1904, setelah Abdul Rivai, seorang siswa kedokteran dari Minangkabau di Belanda menjadi editor bahasa Melayu di *Bintang Hindia* (*The Star of the Indies*), jurnal yang paling berpengaruh di antara masyarakat Indonesia yang berpendidikan. Dia menyarankan bahwa rasa nasionalisme perlu menjangkau sisi psikologis, sehingga orang-orang Indonesia mampu beradaptasi dengan dunia modern. Bergabung dalam dunia yang terus maju, menurut Rivai, seharusnya tidak dipandang sebagai pengurangan identitas seseorang ataupun negara. Hal tersebut dikarenakan dunia modern berkaitan dengan persaingan yang terus-menerus antarnegara, "Masyarakat Indonesia tetaplah orang

Bab 3

Sejarah Perkembangan Pers di Minangkabau

1. Bahasa Tulis dan Pers sebagai Peranti Komunikasi

Modernisasi atau pembaruan di Minangkabau mempunyai korelasi yang sangat erat dengan pendidikan. Modernisasi pendidikan juga berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu dunia Islam dan dunia Barat. Modernisasi di sini antara lain mencakup digunakannya tulisan dan pers.

Sebelum diperkenalkannya pembaruan, di daerah Minangkabau sudah ada berbagai macam corak dan lembaga pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari Buku Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat. Menurut buku tersebut, sebelum diperkenalkannya modernisasi atau pembaruan seperti di atas, di daerah Minangkabau telah ada bentuk pendidikan tradisional menurut adat dan pendidikan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha. Contohnya adalah penurunan petuah-petuah dan kajian adat istiadat serta pewarisan nilai-nilai atau tradisi yang dianut. Dapat ditegaskan bahwa modernisasi atau pembaruan telah melahirkan golongan masyarakat, metode belajar mengajar, juga tradisi pendidikan yang baru.

Masuknya agama Islam dapat dikatakan sebagai modernisasi dalam bidang pendidikan dan komunikasi yang pertama di daerah Minangkabau. Seiring dengan itu, diperkenalkanlah

unsur-unsur baru dalam dunia komunikasi yaitu bahasa Arab sekaligus tulisannya.

Bagi masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Melayu pada umumnya, huruf Arab dengan segala tata bahasanya telah diubah. Akhirnya dikenallah huruf Arab-Melayu atau huruf Jawi di kalangan bangsa Melayu. Suatu huruf yang pada dasarnya berasal dari bahasa Arab tetapi tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah yang semestinya ada dalam bahasa itu.

Diperkenalkannya huruf-huruf Arab Melayu ini memang sesuatu yang baru bagi masyarakat Minangkabau. Apalagi memang belum ada tradisi untuk menuliskan sesuatu yang berupa cerita, berita, atau petuah. Memang sebelum modernisasi tersebut, telah dikenal beberapa prasasti Raja Adityawarman. Namun, adanya prasasti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tradisi tulis-menulis telah diamalkan oleh masyarakat Minangkabau. Tulisan-tulisan pada prasasti-prasasti itu dan isinya hanya tentang Adityawarman sebagai seorang raja dan penguasa. Yang lebih berkembang di masyarakat Minangkabau adalah tradisi lisan, yaitu suatu jaringan komunikasi tradisional yang berupa komunikasi dari mulut ke mulut.

Memang pernah disebut-sebut adanya huruf *rencong* dalam masyarakat Minangkabau, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian. Karena itulah cerita-cerita atau corak-corak lain yang dapat dikatakan sebagai historiografi tradisional Minangkabau hanya dijumpai dalam bentuk lisan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa etnis Minangkabau dahulunya tidak mempunyai sejarah, karena tidak ada sumber-sumber tertulis mengenai hal tersebut.

Hasil modernisasi yang berasal dari dunia Islam ini adalah dikenalnya bentuk surat-menyurat. Modernisasi Islam yang

dilakukan beberapa kali sesudah masuknya agama Islam tersebut semakin memperkokoh kedudukan huruf-huruf Arab Melayu di lingkungan masyarakat Minangkabau. Dalam proses pembaruan berikutnya, seiring dengan dijalankannya pembaruan pendidikan oleh kelompok pembaru pada awal abad kedua puluh, peranan huruf Arab Melayu semakin penting. Buku-buku yang dipakai dalam pendidikan tersebut, khususnya setelah pembaruan, mempergunakan huruf-huruf Arab Melayu di samping Arab sebagai bahasa pengantarnya.

Pengaruh diperkenalkannya tulisan ini dalam sistem komunikasi dan penyampaian sejarah Minangkabau dapat dilihat dari mulai dibukukannya konsep-konsep pemikiran alam Minangkabau mengenai sejarah mereka, khususnya mengenai salah satu bentuk historiografi tradisional Minangkabau yaitu tambo. Bukti bahwa tambo ini baru dibukukan atau disalin setelah agama Islam masuk ke daerah Minangkabau dapat dilihat dari huruf-huruf yang dipergunakan dalam penulisannya, yaitu huruf Arab Melayu. Terlihat juga dari isinya yang mengaitkan dan dikaitkan dengan kondisi-kondisi serta konsep-konsep dalam agama Islam.

Modernisasi atau pembaruan yang berasal dari Barat, bagi masyarakat Minangkabau membuahkan hasil yang hampir sama dengan pembaruan yang berasal dari dunia Islam. Khususnya, bila hasil tersebut kita kaitkan dengan tradisi komunikasi yang baru. Dilihat dari tujuan modernisasi pendidikan Barat yang semula semata-mata untuk kepentingan penguasa kolonial (pemerintah Belanda), sukar menebak nilai pentingnya bagi masyarakat Minangkabau. Namun setelah proses tersebut berlangsung maka hasil yang diperoleh sebagai akibat modernisasi atau pembaruan dari dunia Barat ini segera nampak.

Bentuk yang nyata adalah diperkenalkannya huruf-huruf Latin. Lembaga-lembaga pendidikan kolonial merupakan tempat huruf-huruf ini diperkenalkan oleh penguasa kolonial kepada masyarakat Minangkabau. Huruf-huruf Latin ini jelas memperkaya perbendaharaan mereka dalam hal pemenuhan syarat untuk tradisi tulis-menulis.

Kemudian, dikenal pula bentuk baru dalam berkomunikasi. Hampir identik dengan yang diperoleh dari modernisasi Islam, bentuk baru tersebut antara lain dapat dilihat dari dikenalnya surat-menyurat, tradisi menuliskan sesuatu seperti lewat buku-buku. Di samping itu dengan diperkenalkannya huruf-huruf tersebut sumber bagi penulisan sejarah Minangkabau juga bertambah, kendati sebagian besar bukan masyarakat Minangkabau yang membuatnya. Sumber itu antara lain berbentuk berkas-berkas ataupun tulisan-tulisan lainnya seperti hasil laporan.

Satu lagi unsur yang menjadikan berarti pengenalan huruf-huruf tersebut dan berkembang tradisi bentuk komunikasi adalah munculnya kaum intelektual, baik sekuler ataupun dari kalangan Islam. Kemunculan kaum ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari modernisasi pendidikan. Golongan inilah yang pada mulanya memperkenalkan, mengembangkan, dan melanjutkan tradisi tulis-menulis di Minangkabau. Dari golongan ini pulalah nantinya lahir jurnalis yang mewarnai sejarah daerah Sumatra Barat.

Berkembangnya bentuk baru sistem komunikasi tersebut didukung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan intensif di bidang pendidikan dan yang kedua adalah faktor bahasa yang dipergunakan. Betapa penting peran bahasa ini bagi kelanjutan pengembangan dan pemakaian bentuk komunikasi baru bagi masyarakat dan kemunculan pers di daerah

Minangkabau hingga dapat tersebar jauh melampaui daerahnya.

Satu kelompok masyarakat muncul di Minangkabau pada awal abad kedua puluh dan mempunyai pengaruh dalam bidang pers, yaitu kaum perempuan terpelajar. Yang dimaksud di sini adalah golongan perempuan Minangkabau yang telah mengenal proses pendidikan baik Barat maupun Islam secara langsung.

Perempuan terpelajar ini telah berani memperjuangkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Mereka mampu mendirikan beberapa organisasi ataupun kelompok-kelompok lain. Seperti kelompok kerajinan *Amai Setia* yang mendirikan sekolah khusus wanita yaitu *Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang*. Di samping itu, mereka menggunakan surat kabar dan majalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut.

Satu lagi kelompok yang mempunyai pengaruh kuat di Minangkabau berasal dari golongan Adat. Selain mempunyai massa yang cukup banyak (disebabkan golongan ini terdiri atas pemuka-pemuka adat Minangkabau), mereka mempunyai surat kabar dan majalah-majalah yang cukup berpengaruh. Lewat surat kabar dan majalah inilah, mereka mencoba memasukkan ide. Ide mereka mematahkan buah pikiran yang dilontarkan oleh kelompok golongan lain, khususnya dari golongan pembaru.

Kelompok lain yang berpengaruh dalam kelahiran dan perkembangan pers di daerah Minangkabau adalah golongan masyarakat Tionghoa. Memang keberadaan mereka tidaklah berkaitan langsung dengan proses pembaruan Islam. Namun, dalam perkembangan pembaruan tersebut mereka ternyata juga berperan, terutama karena surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah yang mereka terbitkan.

2. Bahasa Melayu dan Pers Minangkabau

Dalam proses modernisasi pendidikan dan pengenalan huruf-huruf bentuk baru terhadap masyarakat Minangkabau, baik huruf Arab, huruf Arab Melayu ataupun huruf Latin, peranan bahasa Melayu tersebut sangat kentara. Memang penggunaan bahasa Arab dalam proses pembaruan Islam cukup menonjol, tetapi untuk pemantapannya melibatkan penggunaan bahasa Melayu secara intensif.

Modernisasi atau pembaruan pendidikan yang berasal dari Barat mengalami keadaan yang sama. Kendati diperkenalkan oleh orang Barat tetapi dalam proses interaksi pendidikan tersebut, pada mulanya yang dipakai adalah bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Belanda dalam dunia pendidikan Barat di Minangkabau hanya terasa ditekankan di bangku pendidikan yang lebih tinggi, seperti di Sekolah Raja di Bukittinggi. Sedangkan di sekolah yang paling banyak menyerap murid, yaitu sekolah dasar atau sekolah rendah, bahasa yang dipergunakan adalah Melayu.

Bahasa Melayu ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari dan sarana komunikasi oleh sebagian besar penduduk Indonesia, Malaysia, dan daerah Pattani di Thailand Selatan. Masyarakat Minangkabau sepenuhnya dapat memahami bahasa Melayu karena hanya terdapat sedikit perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau ini masih merupakan bagian rumpun bahasa Melayu.

Penggunaan bahasa Melayu di surat kabar dan majalah-majalah yang terbit di Minangkabau tentu saja merupakan suatu kenyataan yang logis. Bahasa Melayu digunakan secara luas. Terbukti semenjak digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, tidak ditemui surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh orang Minangkabau yang menggunakan bahasa daerah Minangkabau sebagai pengantarnya. Surat kabar dan majalah-

majalah tersebut pada mulanya kebanyakan memakai huruf Arab Melayu tetapi kemudian berubah menjadi huruf Latin.

Dengan digunakannya bahasa Melayu ini, majalah-majalah dan surat kabar Minangkabau dapat dibaca oleh penduduk suku bangsa lain yang juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-sehari. Oleh karena itu majalah ini sempat menyebar luas ke daerah-daerah lain yang letaknya jauh dari Minangkabau.

Pengaruh yang lebih berarti bagi masyarakat Minangkabau adalah semakin terbiasanya mereka menggunakan bahasa ini dalam tulis-menulis. Hal ini nampaknya yang membuat masyarakat Minangkabau lebih banyak terjun dan bergelut dalam bidang tersebut dibandingkan masyarakat dari daerah lain. Karya-karya yang dihasilkan bukan hanya berupa buku-buku pendidikan saja, tetapi juga karya-karya sastra. Fakta sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh periode Balai Pustaka, yang merupakan pelopor tulis-menulis di Indonesia, berasal dari daerah Minangkabau. Dua karya orang Minangkabau yang paling populer sebagai terbitan Balai Pustaka di Indonesia adalah novel *Siti Nurbaya* dari Marah Rusli dan *Salah Asuhan* karya Abdul Muis.

Penyebaran bahasa diperkuat lagi dengan munculnya surat kabar pertama berbahasa Melayu di Indonesia. Pada tahun 1858 di Jakarta terbit *Soerat Chabar Betawie* dan setahun kemudian di Surabaya diterbitkan *Soerat Kabar Melajoe*. Inilah koran-koran pertama di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Sebelumnya, yaitu pada tahun 1855, telah beredar surat kabar *Bromartani* yang diterbitkan di Solo dan memakai bahasa Jawa. Namun pada umumnya pers di Indonesia pada waktu itu memakai berbahasa pribumi, yaitu Melayu.

Pelopor koran Melayu di Indonesia yang perlu disebutkan, antara lain *Selompret Melajoe* (Semarang 1860), *Bientang Timoer*

(Surabaya 1861), *Bintang Timoer* (Padang 1865), *Biang Lala* (1867), *Mata Hari* (Jakarta, 1870), *Bintang Pertama* (Padang 1871), *Hindia-Nederland* (1872), *Bentara Melajoe* (Padang 1877).

Dampak seperti ini terus berlangsung, sehingga bahasa Melayu berubah menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Perlu disadari bahwa penggunaan bahasa Melayu di surat kabar dan majalah tidak hanya dimonopoli oleh daerah Minangkabau. Namun bagaimanapun juga, peranan pers yang terbit di daerah Minangkabau dalam rangka memasyarakatkan penggunaan bahasa Melayu, merupakan awal peradaban pers di Indonesia.

3. Pers Minangkabau dari Masa ke Masa

Pers adalah salah satu dari sekian banyak aspek sejarah daerah Minangkabau. Bersama aspek-aspek sejarah yang lain, pers turut serta mengisi lembaran sejarah daerah di Minangkabau. Oleh karena itu, pada tahun 1952, ketika meresmikan pemakaian gedung baru RRI Padang, wakil presiden pertama Indonesia yang berasal dari Sumatra Barat, Bung Hatta, mengatakan bahwa tanpa media massa (dalam artian terbatas pada surat kabar, majalah, dan radio) lembaran sejarah daerah Minangkabau akan kurang lengkap isinya, sehingga pemahaman dan kebanggaan kita menjadi kurang sempurna. Kemudian, Bung Hatta mengulangi bahwa kehadiran media massa membuat sejarah daerah menjadi lebih lengkap dan sempurna.

Media massa adalah produk sejarah dan sekaligus juga menciptakan sejarah. Di samping itu, banyak perubahan lain yang dihadirkan, salah satu di antaranya adalah menciptakan keharmonisan dan mempertajam konflik di tengah masyarakat. Pers Minangkabau telah menjadi sebuah kanvas yang menampilkan potret zaman dan latar belakang agama, sosial, politik, ekonomi,

dan budaya daerah. Pers daerah ini menampilkan wajah daerah dan masyarakat daerah sepanjang waktu keberadaannya.

Berbicara tentang pers di Minangkabau sungguh menarik. Di Minangkabau, sejarah pers sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam. Bahkan keduanya bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Mengenal sejarah pers di Minangkabau, hampir sama dengan mengenal peradaban Islam di Sumatra Barat. Fenomena inilah yang menjadi dasar sebuah pergolakan kaum Minangkabau di dunia jurnalistik.

Periode awal ditandai dengan penerbitan surat kabar berbahasa Belanda oleh orang Belanda (Indo)¹. Substansi surat kabar ini menyuarakan kepentingan pemerintah atau kaum penjajah (termasuk kaum Indo). Hal-hal yang banyak diberitakan adalah kejadian-kejadian di Sumatra Barat yang bersifat menegakkan *rust en orde* (ketenangan dan ketertiban), promosi kepentingan kaum penjajah dan Indo, informasi ekonomi, dan tentu saja iklan.

Beberapa surat kabar yang termasuk kelompok ini adalah *Sumatra Courant* (1859), diterbitkan dan dipimpin oleh L.N.H.A. Chatelin. Pada mulanya surat kabar ini terbit tidak teratur, namun sejak masuknya H.A. Mess tahun 1878, *Sumatra Courant* terbit dua kali seminggu. Surat kabar kedua milik kaum Indo adalah *Padangsch Nieuws en Advertentieblad* (1859) dan diterbitkan oleh R.H. van Wijk Rz. Terbit satu kali seminggu (setiap hari Sabtu).

Surat kabar ketiga adalah *Padangsch Handelsblad* (1871) dan diterbitkan oleh H.J. Klitsch. Tahun 1883 surat kabar ini berganti nama menjadi *Nieuws Padangsch Handelsblad*. Pada tahun 1900, bersama *Sumatra Courant*, surat kabar ini meleburkan dirinya menjadi *De Padanger*. Satu lagi koran jenis ini yang cukup besar dan berpengaruh adalah *Sumatra Bode* yang dimiliki Bauemer dan terbit pertama kali tahun 1892.

Semua surat kabar milik orang Eropa (Indo) ini terbit di kota Padang. Bentuk atau tampilannya sudah mengarah kepada format "standar" surat kabar yang dikenal dewasa ini. Setiap kali terbit berkisar antara empat dan delapan halaman. Terdapat kesan bahwa orang Indo lebih mengutamakan kerja sama daripada persaingan di antara mereka. Penggabungan dua surat kabar *Nieuws Padangsch Handelsblad* dan *Sumatra Courant* menjadi *De Padanger* tahun 1900 adalah satu contoh nyata.

Orang Indo tidak hanya menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda, tetapi juga berbahasa Melayu. Beberapa di antaranya adalah *Bentara Melayu* yang terbit tahun 1877 dan dipimpin oleh Arnold Snackey, serta *Pelita Ketjil* yang terbit tahun 1882 dan dipimpin oleh J. Moss bersama B.A. Dooseau. Kedua surat kabar ini terbit di Padang. Kebanyakan isinya adalah cerita tentang berbagai hal yang berkembang di tengah masyarakat (cerita rakyat) serta beberapa informasi (berita) yang terjadi di negeri Belanda dan Hindia Belanda ini. Khalayak pembacanya adalah orang Melayu. Namun karena waktu itu jumlah orang Melayu yang melek huruf dan memiliki hobi membaca relatif sedikit, kedua surat kabar ini jelas tidak bisa bertahan lama. Apalagi para pemasang iklan yang terdiri dari orang Belanda atau Indo (pemilik *handelhuizen* atau perusahaan-perusahaan lainnya) sangat sedikit yang mau memasang iklan mereka di surat kabar yang diperuntukkan bagi kaum inlander ini.

Ciri lain surat kabar periode pertama adalah adanya kerja sama kaum Indo dengan orang Minangkabau (Melayu). Penerbitan surat kabar *Pelita Kecil* adalah kerja sama pertama antara orang Indo dengan Minangkabau. Setelah kepemimpinan Moos dan Dooseau, *Pelita Kecil* mengangkat salah seorang putra Minang, yaitu Mahyuddin Dt. St. Maharajo sebagai pemimpin surat kabar ini.

Kerja sama tetap berlanjut ketika surat kabar ini berganti nama menjadi *Warta Berita*. Dt. St. Maharajo tetap dipercaya sebagai pemimpinnya. Dua surat kabar lain yang memiliki pola kerja sama ini (antara Indo, Melayu dan juga China) adalah *Perca Barat* (1890) yang dipimpin oleh Lie Bian Goan dan kemudian *Dja Endar Muda*, serta *Tjaja Sumatra* (1897) yang semula dipimpin oleh Lim Sun Hian kemudian oleh Rajo Sampono.

Beberapa surat kabar lain yang termasuk kelompok periode awal ini adalah *Wasir Hindia* (1903) dipimpin oleh St. Rajo Nan Gadang, *Bintang Sumatera* (1903) dipimpin oleh Lim Sun Hian, *Sinar Sumatera* (1905) dipimpin oleh Lim Sun Hin, dan *Warta Berita* (1908) dipimpin oleh St. Rajo Nan Gadang.

Wujud lain ciri surat kabar periode awal ini adalah adanya "versi Melayu" surat kabar berbahasa Belanda. Surat kabar *Tjaja Sumatera* misalnya adalah versi Melayu *Sumatra Bode* sedangkan *Bintang Sumatera* adalah versi Melayu dari *De Padanger*.

Periode kedua adalah zaman bergolak. Zaman ini adalah kurun waktu perkembangan surat kabar telah semakin maju, dalam artian melimpahnya penerbitan surat kabar dan majalah, banyaknya corak dan aliran penerbitan serta beragamnya lokasi terbit. Salah satu ciri utama periode ini adalah dominannya surat kabar dan majalah berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh orang Minang di berbagai pelosok di daerah ini. Jumlahnya bahkan tidak pernah dilampaui oleh kurun waktu lain dalam perjalanan sejarah daerah Sumatra Barat. Jumlahnya lebih dari 50 buah.

Ciri lain periode ini adalah terjadinya pergolakan yang cukup sengit sesama "urang awak" dan juga antara "urang awak" versus kaum penjajah. Pergolakan tersebut terjadi tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di media yang beredar saat itu. Periode ini ber-

langsung sejak dekade kedua abad ke-20 hingga hari-hari terakhir penjajahan Belanda.

Bentuk dan tampilan surat kabar pada periode ini sangat beragam. Ada yang berbentuk "standar" seperti surat kabar atau majalah yang kita kenal dewasa ini, namun banyak pula yang hanya "digiling" dengan mesin stensilan atau "disablon" dengan menggunakan kertas ukuran folio, dan tidak jarang ada juga yang sebagiannya ditulis tangan.

Waktu edarnya pun sangat beragam. Ada yang tidak teratur, ada yang terbit sekali seminggu, dua kali seminggu atau harian. Umumnya, jumlah halaman surat kabar adalah empat dan delapan halaman. Majalah terbit sekali seminggu, dua kali atau satu kali sebulan dan jumlah halamannya sangat bervariasi. Umur rata-rata surat kabar itu juga relatif pendek, sekitar dua atau tiga tahun. Sangat sedikit yang berusia lebih dari dua atau tiga tahun. Penyebab utama kematian sebagian besar surat kabar dan majalah tersebut adalah masalah finansial yang diakibatkan oleh kurangnya iklan dan lalainya pelanggan membayar uang langganan serta sangat minimnya pemasukan dari penjualan langsung.

Mahyuddin Datuk Sutan Maharajo adalah salah satu tokoh pers yang besar pada periode ini. Tokoh yang pernah digelar sebagai "Datuk Bangkik" karena memimpin demonstrasi besar di kota Padang untuk memperjuangkan kebangkitan adat Minangkabau dalam lingkungan Hindia Belanda Raya ini menerbitkan dan memimpin dua surat kabar saat itu, yakni *Oetoesan Melayu* (1910) dan *Soeloeh Melajoe* (1914). Kedua surat kabar yang terbit di Padang ini menjadi wadah bagi kaum adat untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya. Oleh karena itu, Datuk Sutan Mahara juga dikenal sebagai seorang tokoh pers kaum adat.

Beberapa surat kabar/majalah kaum adat lainnya adalah *Barito Minangkabau*, *Berita Adat*, *Boedi Chaniago*, dan lain sebagainya.

Kaum adat waktu itu memang tengah menghadapi “tantangan” dari sekelompok ulama muda yang ingin mengadakan pembaruan dalam kehidupan sosial dan budaya, serta praktik keagamaan warga daerah. Dengan surat kabar inilah Datuk Sutan Maharajo dan tokoh-tokoh kaum adat ingin mempertahankan adat lama “pusaka usang” demi kebesaran alam Minangkabau. Sebaliknya ulama muda pembaru juga menjadikan surat kabar dan majalah sebagai wahana menyebarluaskan ide dan gagasan pembaruan sosial, budaya, dan praktik keagamaan yang mereka luncurkan.

Tokoh peletak dasar pers Islam (pembaru) di Sumatra Barat adalah H. Abdullah Ahmad. Tokoh pendiri lembaga pendidikan Islam modern Adabiah, yang disebut B.J.O. Schrieke sebagai Bapak Jurnalisme Islam pertama Indonesia, ini menerbitkan dan memimpin majalah *Al-Munir* (1911). Di samping itu ada Zainuddin Labay el-Yunusi yang menerbitkan *Munirul Manar* (1919), Syekh Ibrahim Musa Parabek yang menerbitkan *Al-Bayan* (1920), Mahmud Yunus dan Ismail Laut yang menerbitkan *Al-Basyir*, H. Rasyid yang menerbitkan *Al-Ittikan*, serta H. Abbas yang menerbitkan *Al-Iftiraq*.

Penerbit atau pemimpin kelima surat kabar atau majalah di atas adalah bagian kaum muda pembaru Islam. Surat kabar ini diterbitkan di berbagai lokasi, seperti *Al-Munir* di Padang, *Munirul Manar* di Padang Panjang, *Al-Bayan* di Parabek (Bukittinggi), *Al-Basyir* di Sungayang (Batu Sangkar), *Al-Ittikan* di Maninjau, dan *Al-Iftiraq* di Padang Japang (Payakumbuh). Semua surat kabar atau majalah ini tergabung ke jaringan lembaga pendidikan Islam Sumatera Thawalib, sehingga dapat pula dikatakan bahwa surat kabar atau majalah di atas diterbitkan oleh Sumatera Thawalib Group.

Isi atau berita yang ditampilkan kelima surat kabar atau majalah ini umumnya tentang perkembangan (kemajuan dan pembaruan) di dunia Islam, soal-soal keagamaan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits (dengan penafsiran pembaruan), serta tentu saja berita dan persoalan umum. Serangan terhadap kaum adat atau media kaum adat juga sering tampil. Usia kelima surat kabar ini juga tidak begitu lama. Salah satu penyebab kematiannya adalah kekurangan dana.

Di samping berhadapan dengan kaum adat, surat kabar dan majalah pembaru Islam juga berhadapan dengan surat kabar kaum tua Islam. Artinya kelompok ulama yang cenderung bersifat konservatif dan berpegang kepada praktik-praktik keagamaan lama, yang dalam banyak hal—menurut pandangan kaum pembaru masih bercampur dengan hal-hal yang bid'ah. Salah satu surat kabar yang menyuarakan suara kaum tua Islam ini adalah *Arrad Wal Mardud* yang dipimpin oleh Sirajuddin Abbad. Ia dikenal sebagai tokoh Persatuan Tarbiyah Indonesia.

Konflik antara kaum adat dan pembaru Islam juga ikut memegang andil bagi kelahiran surat kabar yang menyuarakan suara kaum perempuan. Surat kabar *Soenting Melajoe* yang terbit pertama kali tahun 1911 di Padang di bawah pimpinan Rohana Kudus mempunyai ikatan yang kuat dengan kaum adat, khususnya Dt. St. Maharajo. Surat kabar *Suara Perempuan* yang lahir tahun 1919 di Padang di bawah pimpinan Sa'adah Alim memiliki ikatan yang kuat dengan kaum pembaru Islam. Beberapa surat kabar wanita lain yang tidak terlibat konflik kaum adat dengan kaum muda pembaru Islam, tetapi lebih bersifat islamis nasionalis atau pendukung gerakan emansipasi wanita, adalah *Asjraq* (surat kabar bulanan yang menjadi wadah bagi berbagai perhimpunan perempuan di daerah ini), *Medan Puteri* (surat kabar kaum perempuan dari partai politik Persatuan Mus-

lim Indonesia, Permi), *Suara Puteri* (surat kabar untuk kalangan remaja putri), dan *Suara SKIS* (surat kabar untuk ibu-ibu rumah tangga dan diterbitkan oleh organisasi Serikat Kaum Ibu Sumatera). Ketiga surat kabar ini terbit di tiga kota yang berbeda, yaitu Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang.

Satu lagi yang terbit pada periode ini adalah surat kabar komunis. Tokoh-tokoh utama surat kabar ini adalah H. Dt. Batuah dan Djamaluddin Tamin yang menerbitkan *Pemandangan Islam* (1923), Natar Zainuddin yang menerbitkan *Jago-Jago* (1923), Ahmad Khatib yang menerbitkan *Petir* (1924). Dua surat kabar yang disebut pertama terbit tiga kali seminggu dan yang terakhir terbit sekali seminggu. Ketiga surat kabar ini terbit di Padang Panjang.

Dua surat kabar lain yang juga beraliran komunis adalah *Suara Tambang* dan *Panas*. Surat kabar yang pertama dipimpin oleh Idrus dan yang kedua oleh H. Nawawi. Keduanya diterbitkan di Sawahlunto. Surat kabar komunis ini tidak ada yang lama hidupnya karena pemerintah kolonial bersikap keras terhadap mereka. Tekanan ini dilakukan karena tulisan yang ditampilkan terlalu kritis terhadap pemerintah, juga menyebabkan “gangguan” di tengah masyarakat.

Bentuk lain surat kabar yang beredar di Sumatra Barat adalah surat kabar/majalah yang mewakili suara pelajar dan pemuda. Beberapa surat kabar yang termasuk kelompok ini adalah *Signal* (Leon Salim), *Pemberi Sinar* (Khatib Sulaiman dan Leon Salim), dan juga ada majalah untuk anak-anak yang bernama *Rantai Mas* yang diterbitkan INS Kayutanam serta *Pelipur Hati* yang diterbitkan Abang di Bukittinggi.

Di samping bentuk-bentuk di atas juga ada sejumlah lain surat kabar dan majalah yang terbit dengan mengatasnamakan

perkumpulan (organisasi) dan kampung halaman, tentu saja dalam bentuk umum. Beberapa di antaranya yang masuk kelompok (perkumpulan) atau organisasi adalah: *Suara PMDS* (PMDS), *Medan Rakyat* (Permi), *Suara Sumatera Thawalib* (Sumatera Thawalib), *Pahlawan Muda* (HPPII), *Attabliq* (Muhammadiyah), *Utama* (Himpunan Pelajar Muhammadiyah), *Suara Muhammadiyah* (Muhammadiyah), *Keris* (Permi Cabang Agama), *Bahtera* (HPPM), *Abuan Guru* (guru-guru Sumatera Barat), *Adabiah* (Sekolah Adabiah), *Pemimpin Nagari* (Pemda), *Taman Priyayi* (VIBA), dan banyak lagi. Beberapa surat kabar dan majalah yang terbit mewakili kampung halaman adalah *Suluh Agama*, *Berita Kurai*, *Suara Koto Gedang*, dan *Suara Sumpur*.

Selanjutnya ada banyak sekali surat kabar/majalah umum. Beberapa di antaranya adalah *Sinar Sumatera*, *Radio*, *Pewartar*, *Persamaan*, *Sumatera Bode*, *Perantaraan Kita*, *Energi*, *Cambur Raya*, *Dewan Pemuda*, *Timur Baru*.

Ada sesuatu yang menarik dari surat kabar/majalah yang terbit pada periode kedua ini. Pertama, surat kabar/majalah yang terbit hingga tahun-tahun terakhir 1920-an lebih banyak melibatkan diri ke dalam konflik yang terjadi pada saat itu. Pertama, konflik yang terjadi sesama “urang awak” (konflik antara kaum adat dan pembaru Islam). Tidak ketinggalan pula konflik dalam menentukan posisi suatu kaum (misalnya perempuan) tengah masyarakat. Kedua, konflik antara “urang awak” dengan penjajah (diwakili oleh surat kabar komunis).

Jumlah surat kabar dan majalah yang terbit pada subperiode ini cukup banyak, tetapi belum sebanyak yang terbit pada tahun 1930-an. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena munculnya *vergaderverbod* (larangan berkumpul yang dikeluarkan pemerintah pasca pemberontakan PKI Silung-

kang tahun 1927). Larangan rapat tersebut direspons dengan menerbitkan sebanyak mungkin surat kabar/majalah. Dengan demikian larangan rapat menjadi tidak efektif, sebab warga daerah menjadikan surat kabar dan majalah sebagai ajang "rapat" yang baru.

Penyebab lain adalah relatif jarang terjadi pembredelan terhadap pers oleh pemerintah. Pemerintah tampaknya membiarkan surat kabar atau majalah menulis sesuka hati. Kematian sebagian besar surat kabar daerah (dengan beberapa pengecualian kecil) lebih banyak disebabkan oleh masalah finansial.

Periode 1942–1945 adalah zaman terbelenggu, berarti penerbitan surat kabar dan majalah dikekang oleh penguasa. Zaman ini berlangsung pada saat Jepang berkuasa di daerah ini. Sifat pemerintahan tentara pendudukan yang militeristik dan represif membuat media massa (terutama surat kabar) tidak berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Pemerintah melarang (memberangus) semua surat kabar dan majalah yang telah terbit semenjak zaman Belanda. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan tentara ke-25 yang berkuasa di Sumatra, di setiap *shu* (karesidenan) hanya boleh terbit satu surat kabar berbahasa Melayu, maka satu-satunya surat kabar yang terbit di daerah ini hanyalah *Padang Nippo*. Pada mulanya surat kabar ini terbit di Padang (1942), tetapi semenjak tahun 1944 dipindahkan ke Padang Panjang. Pemerintah pendudukan Jepang juga membuat peraturan bahwa surat kabar atau majalah (berbahasa Melayu) yang diterbitkan di daerah lain dilarang beredar di sini.

Satu lagi surat kabar yang terbit dan beredar di Sumatra Barat adalah *Sumatora Simbun*. Namun yang satu ini lebih ditujukan kepada orang Jepang yang berdomisili di daerah ini, karena

berhuruf Kanji. Sama dengan *Padang Nippo*, pada mulanya *Sumatora Simbun* terbit di Padang tetapi kemudian dipindahkan ke Padang Panjang. Sumber daya yang menggerakkan kedua surat kabar ini terdiri atas wartawan Melayu atau Cina yang telah lama malang-melintang dalam dunia jurnalistik, yang mau tidak mau, dipaksa bekerja sama dengan Jepang.

Berita yang disampaikan sebagian besar berupa propaganda Jepang tentang berbagai janji kebaikan yang akan diwujudkan serta berita kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Jepang di medan laga. Dengan kata lain, yang diberitakan dan ditampilkan melulu mengenai yang baik tentang Jepang. Berita tentang daerah atau orang daerah sesungguhnya, yang menderita akibat sistem pemerintahan yang militeristik dan represif tidak pernah disebutkan satu kali pun.

Selanjutnya adalah periode berjuang sejak proklamasi kemerdekaan hingga akhir tahun 1949. Pada kurun waktu ini warga Sumatra Barat tengah sibuk berjuang secara fisik dan juga mental menyelamatkan kemerdekaan yang telah diproklamirkan, orang Belanda pun tengah berjuang untuk mencengkeramkan kukunya kembali di daerah ini.

Ada dua bentuk utama surat kabar yang terbit pada masa ini, surat kabar nasionalis dan surat kabar Belanda atau pro Belanda. Surat kabar nasionalis jelas mendukung kemerdekaan, isinya menggelorakan semangat juang dan semangat mencintai tanah air. Surat kabar atau majalah nasionalis ini juga dapat dibagi lagi ke dalam beberapa subunit. Ada surat kabar/majalah yang diterbitkan oleh dan dikelola secara umum. Beberapa contohnya (terbit tahun 1945) adalah *Berjuang* yang diterbitkan oleh Bustanuddin Ismail di Padang Panjang beberapa saat setelah pengumandangan proklamasi, *Utusan Sumatera* yang diterbitkan

Bariun A.S. di Padang dalam waktu yang hampir bersamaan dengan hadirnya *Berjuang*, *Pedoman Kita* yang diterbitkan Yusja dan Decha (September 1945) di Bukittinggi, *Kedaulatan Rakyat* yang diterbitkan Adinegoro (Oktober 1945) di Bukittinggi, serta *Demokrasi* yang diterbitkan Yusja dan M. Yusuf di Padang Panjang. Termasuk juga majalah *Menara* yang diterbitkan Hamka serta *Haskim* yang diterbitkan Muhammadiyah. Pada tahun 1946 terbit lagi surat kabar *Penerangan* yang dipimpin Oei Tin Jin. Dari delapan media pada periode ini yang telah disebutkan, *Kedaulatan Rakyat* merupakan yang terbesar. *Kedaulatan Rakyat* pernah mencapai oplah sebanyak 14.000 eksemplar, jumlah yang mencengangkan di zaman itu. Besarnya oplah ini tentu tidak bisa dipisahkan dari tingginya minat masyarakat untuk membaca koran karena adanya keinginan guna mengikuti perkembangan proklamasi kemerdekaan serta situasi politik daerah dan nasional waktu itu. Di samping itu, *Kedaulatan Rakyat* beredar di wilayah yang lebih luas dan lebih bebas memberitakan. Latar belakang yang disebut terakhir ini dikarenakan *Kedaulatan Rakyat* diterbitkan di daerah republik. Kelak nama Adinegoro, pendiri *Kedaulatan Rakyat* dan tokoh pers nasional, diabadikan oleh masyarakat sebagai nama Balai Wartawan Padang. Beliau berhasil memperjuangkan alat-alat percetakan, kertas, dan tinta di Kayu Ramang.

Pada bulan yang sama di kota Padang juga muncul *Suara Sumatera* yang diterbitkan oleh Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin oleh S. Alauddin. Namun, sayang usia surat kabar ini tidak panjang. Namun, pemiliknya menerbitkan surat kabar lain, yakni *Harian Penerangan*.²

Ada dua surat kabar *republikan* yang paling berpengaruh ketika tentara sekutu yang diboncengi NICA masuk ke Padang September 1945, yaitu *Utusan Sumatera* dan *Kedaulatan Rakyat*. *Utusan Sumatera* diterbitkan oleh Bariun AS bersama Mulkan,

Muchtar Mahyuddin, Marah Alif, dan sejumlah nama lain, merupakan surat kabar *republikan* yang paling berpengaruh di dalam kota. Sebaliknya, *Kedaulatan Rakyat* menjadi surat kabar yang paling berpengaruh di daerah pedalaman. Kedatangan Sekutu menyulitkan awak surat kabar *Utusan Sumatera*. Awak surat kabar ini sering menghadapi ancaman oleh Sekutu dan akhirnya kantor mereka dihancurkan Sekutu dengan dinamit.

Satu lagi surat kabar *republikan* yang terbit dan beredar di kota Padang saat sekutu dan Nica berkuasa adalah *Cahaya Padang*, yang dipimpin oleh M. Yusuf dan St. Johan. Surat kabar ini berhenti terbit ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama tanggal 21 Juli 1947, karena seluruh pimpinan dan staf redaksi serta wartawannya ditawan Belanda.

Setelah sekutu (Belanda) masuk dan melancarkan agresi militernya yang pertama, *Kedaulatan Rakyat* berganti nama menjadi *Utusan Rakyat*. Pergantian ini juga dilatarbelakangi oleh kepergian Adinegoro ke Pulau Jawa dan mempercayai Anwar Luthan menjadi pemimpin redaksi koran tersebut. Setelah agresi militer Belanda kedua, pers (umum) Sumatra Barat mulai mengalami masa suram. Penerbitan tidak dapat berjalan dengan baik, halangan yang paling mendasar adalah sukarnya mendapatkan bahan baku kertas.

Di samping surat kabar umum, pada masa ini juga ada surat kabar yang menyuarakan suara kalangan tentara, seperti *Harian Banteng* dan *Suara Padang* yang diterbitkan Bagian Penerangan Tentara Div. IX Banteng. *Harian Banteng* memuat warta penerangan perjuangan dan beredar di daerah pedalaman, sedangkan *Suara Padang* beredar di dalam kota (Padang). Tahun 1947 juga terbit majalah *Senapati* yang dikeluarkan oleh Komandemen Tentara Sumatra Seksi XI.

Salah satu kejadian historis yang juga menjadi tonggak sejarah media di Sumatra Barat adalah pembukaan kantor cabang berita Antara di daerah ini (Bukittinggi). Pembuatan kantor berita tersebut kelihatannya terinspirasi oleh keberadaan Domei, kantor berita tentara pendudukan Jepang.

Beberapa surat kabar lainnya yang terbit di daerah ini pada masa revolusi adalah *Detik* (Parada Harahap), *Panca Sila* (Usman Hasibuan), *Aksi* (Yusuf Su'ib), *Genderang Sahid* (Tamar Jaya), *Mata Rakyat* (Taher Samad), *Menara Rakyat* (Suska), *Gunung Singgalang* (Darwis Abbas), *Haluan* (Adaham Hasibuan), serta *Riak Buana* (Bukittinggi). Hampir semua surat kabar ini terbit dalam waktu yang sangat terbatas dan dalam format atau tampilan yang sangat beragam. Di samping terbit dalam bentuk "standar" seperti yang dikenal saat sekarang, sebagian besar surat kabar di atas terbit dalam bentuk stensilan atau "sablon" semata, oplahnya juga sangat sedikit (500 s.d. 1.000 eksemplar) dan beredar di wilayah yang terbatas.

Sebuah perkembangan yang menarik terjadi pada akhir tahun 1949 (pascapengakuan kedaulatan). Surat kabar nasionalis yang sebelumnya "bermarkas" di Bukittinggi memindahkan kantornya ke Padang. *Haluan* adalah salah satu contohnya. Kasoema, wartawan *Demokrasi* di Padang Panjang pada 1948, menerbitkan surat kabar *Haluan* di Bukittinggi, dan saat itu harian ini telah dinakhodai oleh Darwis Abbas yang kemudian memindahkan kantor harian ke Padang.

Sebelum *Haluan* milik Kasoema, pada tahun 1926 pernah terbit surat kabar bernama sama di Padang. *Haluan* sama radikalnya dengan surat kabar *Boeka Mata* yang dipimpin Muhammad Sahak. Mottonya saja berbunyi, "Haluan menerangkan macam-macam kesesatan dan kegelapan yang telah ditaburkan oleh

beberapa pembohong dan pendusta," tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud "pembohong dan pendusta" itu.

Sejumlah surat kabar lainnya juga memperkaya konfigurasi jagat pers Minang, seperti *Suara Merdeka*, *Pelopop*, *Nyata*, dan tabloid *Kemudi*. Juga ada penerbitan surat kabar baru dengan nama *Warga Merdeka* yang dipimpin oleh M. Riwan. Ada juga surat kabar yang sebelumnya telah terbit, seperti *Penerangan* yang dipimpin Lie Un Sam.

Sebuah perkembangan lain adalah mulai maraknya penerbitan yang dikelola oleh lembaga pemerintahan, seperti yang diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Provinsi dan Kabupaten di Sumatra Barat (ada 11), ada satu yang diterbitkan oleh Persatuan Pamopraja, yaitu Perkembangan, dan ada pula yang diterbitkan Djawatan P.P. dan K, yaitu Penghubung.

Di samping surat kabar *republikan*, periode berjuang juga ditandai dengan terbitnya atau beredarnya surat kabar yang pro Belanda. Salah satu yang termasuk kelompok ini adalah *Padang Bode*. Surat kabar ini seratus persen menyuarakan suara sekutu dan Belanda. Isinya lebih banyak propaganda tentang keberhasilan sekutu dan Belanda menghadapi kaum tentara republik, serta tangkisan-tangkisan terhadap pemberitaan surat kabar/majalah *republikan*. Surat kabar ini terbit sepanjang masa revolusi, namun hanya beredar di dalam kota Padang.

Periode berjuang sesungguhnya merupakan masa di mana kehadiran surat kabar dan majalah tidak berorientasi kepada keuntungan finansial. Tujuan utama penerbitannya adalah untuk ikut serta menggelorakan perjuangan. Karena itu hampir tidak ada surat kabar zaman ini yang bertahan lama hingga melampaui periode perang tersebut.

4. Aktualisasi Perjuangan Pemikiran untuk Bangsa

Dinamika pergeseran isu yang terjadi membuat tingginya minat baca masyarakat Sumatra Barat. Tingkat minat baca yang tinggi tidak hanya tercermin melalui wajah penerbitan pada waktu itu, tetapi juga dalam banyaknya kiriman buku-buku dari Timur Tengah. Semangat juang yang menggelora pun terlihat dari jumlah pemesan *Indonesia Merdeka*, surat kabar terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dari 280 pelanggan *Indonesia Merdeka* di Hindia Belanda pada tahun 1924, pelanggan tertinggi berada di Jawa Tengah sebanyak 68 orang dan Jakarta 45 orang. Sementara Sumatra Barat berada pada urutan ketiga dengan 37 pelanggan, yang menjadikannya sebagai satu-satunya daerah di Indonesia di luar pulau Jawa yang mengakrabi media cetak secara menakjubkan.

Sebanyak 10 surat kabar di Padang memakai judul yang memikat dan menggelorakan roh perjuangan, seperti *Pelita Ketjil*, *Djago-Djago*, *Boeka Mata*, *Soeloeh Melajoe*, *Bintang Tionghoa*, dan *Perubahan*. Dari 107 surat kabar dan majalah yang diterbitkan kaum terpelajar di Indonesia, seperti dicatat oleh B. Schrieke (penasihat pemerintah Belanda urusan Bumiputra), surat kabar di Padang dan Semarang-lah yang memakai nama-nama bernuansa perjuangan semacam itu.

Sumbangan surat kabar sebelum kemerdekaan terasa ber-nasnya. Mereka membangun masyarakat yang berpikir, menghargai pendapat, dan memberi ruang bagi pengembangan ide-ide. Namun, pada periode berikutnya, mungkin karena medan perjuangan yang juga berbeda, kehadiran surat kabar dan majalah lebih banyak bercerita pada rencana setelah kemerdekaan. Lambat-laun mereka masuk ke dalam kusut-masainya persoalan bangsa.

Hal ini juga dijelaskan oleh Goenawan Mohamad (mantan pemimpin redaksi majalah *Tempo*) dalam kumpulan esai-nya

Catatan Pinggir I (1982). Dalam esainya, Gunawan mengutip pernyataan salah satu surat kabar pada masa itu, "Jangan Loepa! Djangan Laloe! Dan djangan maoe ketinggalan! Pemandangan Islam tersedia untuk membela Ra'jat yang melarat dan tertindas." Pernyataan yang merupakan sebuah iklan perjuangan ini adalah tipikal Indonesia pada 1920-an yang resah, mengabarkan kelahiran sebuah surat kabar perjuangan. Pernyataan ini dimuat pada tanggal 11 November 1923 di surat kabar perjuangan, yang namanya tidak pernah ditiru oleh surat kabar lain di Indonesia sampai saat ini, yaitu *Djago Djago*.

Yang sangat menarik adalah bahwa surat kabar *Pemandangan Islam* maupun *Djago-Djago* membawa bendera Islam tetapi juga panji komunisme. Keduanya didirikan Ahmad Khatib gelar Haji Datuk Batuah, orang Koto Lawas, yang bagi para ulama dan penghulu adat di Sumatra Barat waktu itu, mencengangkan sekaligus membuat cemas. Surat kabar *Djago-Djago* terbit tiga kali seminggu dan tampil sebagai bacaan yang keras. Kondisi rakyat yang melarat menjadi bahan propaganda di surat kabar ini. Sementara itu, surat kabar *Pemandangan Islam*, tampil lebih ilmiah sebagai jurnal teoretis tentang komunisme Islam. Ahmad Khatib adalah tokoh jurnalis yang agresif. Ia murid Haji Rasul di sekolah pesantren Thawalib, Kota Padang Panjang. Ia kemudian berusaha menjadikan Thawalib sebagai basis kegiatan politiknya, walaupun akhirnya gagal.

Melalui kedua surat kabarnya itu, Ahmad Khatib menyemai paham komunisme di Minangkabau. Thawalib secara mengejutkan menampilkan murid-murid yang cenderung berpolitik, sesuatu yang ditentang orang-orang pesantren di Parabek, yang apolitis. Pengaruh komunisme di Minangkabau tak dapat dimungkiri. Sejarah Indonesia mencatat bahwa pemberontakan pertama terhadap pemerintah Belanda digerakkan oleh kaum

komunis yang terjadi di Silungkang pada 1927. Tujuannya memerdekan rakyat dari penjajah. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas kolonial.

Surat kabar *Djago-Djago* dan *Pemandangan Islam* merupakan bagian dari 20 penerbitan berhaluan komunis di Indonesia yang tersebar di berbagai kota sepanjang 1920-an. Di Sumatra Barat saja, selain di Padang Panjang, surat kabar sehaluan terdapat di Padang (*Petir*, *Buka Mata*, dan *Torpedo*), Bukittinggi (*Doenia Achirat*), dan Solok (*Sasaran Ra'jat*). Surakarta yang terbanyak, memiliki enam surat kabar, disusul Semarang dan Bandung, masing-masing empat surat kabar. Baik yang terang-terangan membawa suara kaum komunis maupun yang tidak, hampir semua surat kabar terbitan 1920-an berhaluan radikal revolusioner. Sebagaimana yang dicatat Gunawan Mohamad, "Indonesia di tahun '20-an memang memungkinkan banyak hal yang ramai." Namun, jumlah penerbitan atau surat kabar berhaluan kiri ini jauh lebih kecil dibanding yang diterbitkan kalangan Islam sendiri. Ketika Jepang berkuasa di Sumatra Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar. Sepanjang 3,5 tahun itu, hanya ada tiga surat kabar yang sepenuhnya dikendalikan Jepang. Ketiganya, *Padang Nippo*, *Sumatora Simbun*, dan *Domei*.

Begitu Indonesia merdeka, suasana pun berubah. Para wartawan yang dulu memiliki surat kabar, berkeinginan menghidupkan kembali surat kabarnya yang mati suri. Masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung di Pulau Jawa. Rasa haus itu terpuaskan oleh Bustanuddin yang menghadirkan majalah bulanan *Berdjuang* dan terbit di Padang Panjang pada September 1945. Di kota yang sama, tiga bulan kemudian, muncul harian *Demokrasi* yang diterbitkan Yusdja dengan pemimpin redaksi M. Joesoef.

Pada tahun 1946, tokoh ulama besar Sumatra Barat, Hamka dan Haskim kembali menghadirkan sebuah majalah di Padang Panjang dengan nama *Menara*. Majalah ini membawa suara golongan Muhammadiyah. Setelah di Padang Panjang, pada bulan September 1945 di Padang, hadir pula harian *Utusan Sumatera* yang diterbitkan Bariun A.S. bersama Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif, dan sejumlah nama lain. Sedangkan di Kota Padang, pada bulan yang sama, lahir surat kabar *Suara Sumatera* yang diterbitkan Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin S. Alaudin. Umurnya sangat singkat. Tetapi kemudian pemiliknya menerbitkan surat kabar yang lain dengan kiblat sama, yaitu *Harian Penerangan*.

Begitu semangatnya tokoh-tokoh jurnalis Sumatra Barat kembali memunculkan pergolakan pemikiran setelah dikungkung di zaman penjajahan Jepang. Salah satu tokoh jurnalis Sumatra Barat yang sangat idealis, Adinegoro (seorang tokoh pers nasional juga dan sekarang namanya diabadikan menjadi nama Balai Wartawan Padang) juga tidak mau ketinggalan untuk mengobarkan semangat juang nasionalisme di zaman kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ia menerbitkan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada Oktober 1945, tepatnya di kota Bukittinggi, Sumatra Barat. Adinegoro berhasil memperjuangkan alat-alat percetakan, kertas, dan tinta di Kayu Ramang yang selama ini dikuasai Jepang. Lalu ia mengangkat Anwar Luthan menjadi pemimpin redaksi koran ini.

Sementara itu di zaman kemerdekaan juga, Kasoema yang menjadi wartawan *Demokrasi* di Padang Panjang, pada tahun 1948 menerbitkan surat kabar *Haluan* di Bukittinggi. Tidak lama kemudian kantor harian *Haluan* ini pindah ke Padang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Taufik. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, Ithaca, New York: Cornell University, 1971.
- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat. Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdullah, Taufik. *Modernisasi dalam Alam Minangkabau: Sumatera Barat Pada Dekade Permulaan Abad XX*, Terj. Drs Ishaq Thaher, Padang: FKPS-IKIP Padang, 1967.
- Abdullah, Taufik. "Modernization in Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the 20 Century", dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007.
- Adam, Ahmat. *Suara Minangkabau: Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah di Sumatra Barat*, Kuala Lumpur: University Malaysia, 1995.
- Adam, Ahmat. *The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*, Singapore: Cornell Southeast Asia Program, 2012.
- Ahmad, Sabaruddin. *Kesusastraan Minangkabau Klasik dan Hubungannya dengan Kesusastraan Indonesia*, Jakarta: Departemen P & K, 1979.
- Ahmad Husein et al. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950, Jilid II, Cetakan ke-2*, Jakarta: BPSIM, 1992.
- Algadri, Hamid & C. Snouck Hurgronje. *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Amir, Mafri. *Historiografi Pers Islam Indonesia Mengenal Majalah Soeloeh Melajoe (1913-1915)*, Jakarta: Quantum, 2000.
- Amran, Rusli. *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- Anon. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Policy, 1926-1998*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
- Arnold, Thomas W. *The Priching of Islami*, (Indonesian 2nd ed.), Jakarta: Widya, 1981.
- Arpan, Floyd G. (1970). *Wartawan Pembina Masyarakat: Suatu Pedoman Kerja Wartawan Berdasarkan Teori Tanggung Jawab*, Bandung: Binatjipta, 1970.
- Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPISM). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950, Vol. 1*. Jakarta: Mutiara Offset, 1978.
- Batuah, A.M. Dt. Maruhum & Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Minangkabau*, Djakarta: Pusaka Aseli, 1956.
- Chusaen. *Riwayat Persuratkabaran*, Jakarta: Mutiara, 1979.

- De Jong, P.E. de Josselyn. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structures in Indonesia*, Jakarta: Bhatara, 1960.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Departemen P&K, 1979.
- Departemen Pendidikan. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Dep. P&K, 1980/1981.
- Diradjo, Datuk Sangguno. *Mustika Adat Alam Minangkabau*, Jakarta: Kementerian P&K, 1955.
- Djaja, Tamar. *Rohana Kudus Riwayat Hidup dan Perjuangan*, Jakarta: Mutiara, 1980.
- Djapenste. *Perslag Djapenste 1953*, Bukittinggi, Djapenste, 1953.
- Djapenste. *Sumatera Tengah: Laporan tahun 1954*, Bukittinggi: Djapenste, 1954.
- Diapenste. *Radio Rimbu di Sumatera Tengah*, Bukittinggi: Djapenste, 1954.
- Djapenste. *Sumatera Tengah Membangun: Dipersembahkan Untuk Menyambut Rentjana 5 tahun*, Bukittinggi: Djapenste, 1956.
- Dobbin, Christine. "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Paderi Movement, 1784-1830", dalam *Indonesia*, 23 April, 1977.
- D'I. Bandaro, Ch. N. Latief. *Etnis dan Adat Minangkabau, Permasalahan dan Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 2002.
- Graves, Elizabeth. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, Ithaca, New York: Cornell University, 1981.

- Hamka. *Ayahku*, Jakarta: Jayamurni, 1967.
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hamka, Rusdi. *Etos Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Hamka, Rusdi. *Islam dan Era Reformasi*, Jakarta: IAIN, 1989.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997.
- Hitti, Philip. K. *History of Arabs* London: MacMillan & Co. Ltd., 1960.
- Ibrahim, Ahmad, Sharon Siddique & Yasmin Hussain. *Readings on Islam in Southeast Asia: Roff, William. Kaum Muda-Kaum Tua, Innovation and Reaction Amongst the Malays, 1910-1941*, Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1985.
- Ibrahim, Ahmad, Sharon Siddique & Yasmin Hussain. *Readings on Islam in Southeast Asia: Schrieke, B. Islam, Adat and Communism on the West Coast of Sumatra*, Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1985.
- Ibrahim, Ahmad; Sharon Siddique & Yasmin Hussain. *Readings on Islam in Southeast Asia: Noer. Deliar. The Development and Nature of the Modernist Movement in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1985.
- Ibrahim, Ahmad; Sharon Siddique & Yasmin Hussain. *Readings on Islam in Southeast Asia: Swift, M.G. Minangkabau and Modernization*, Singapore: Institute of Southeast Asian Study, 1985.

- Naim, Mochtar. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti, 1984.
- Negoro, Adi. *Falsafah Ratu Dunia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942* (4th ed.), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988.
- Oki, Akira. *Social Change in The West Sumatera Village in 1908–1945*, Canberra: Australian National University, 1979.
- Pandoe, Marthias Dusky. *Memoar Seorang Wartawan: A nan takana* (Apa yang Teringat), Jakarta: Penerbit Kompas, 2001.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia & Zaman Kebangkitan Nasional & Masa Hindia Belanda*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Radjab, Muhammad. *Perang Paderi di Sumatera Barat 1803–1838*, Jakarta: Balai Pustaka, 1954.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Rivai, Dr. A. *Student Indonesia di Europa*, N.V. Electr. Drukkerij & Uitgeverij Mij. Bintang Hindia Weltevreden, 1928.
- Roff, William R. *Islam and The Political Economy of Meaning: Roff, William R. Islamic Movements: One or Many*, New York: Social Science Research Council, 1987.

- Ronkel, Ph. S. van. *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*, Jakarta: Landsdrukkerij, 1916.
- Rusli, Marah. *Siti Noerbaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1922.
- Samad, Duski. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau, Syarak Mandaki Adat Manurun* (2nd ed), Jakarta : The Minangkabau Foundation YPEKM, 2003.
- Schrieke, B. "Bijdrage tot de bibliografie van de huidige godsdienstige beweging ter Sumatras's Westkust", *Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land-, en Volkenkude*, LIX, 1921.
- Schrieke, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bharata, 1972.
- Seno, Oemar. *Pers dan Aspek-aspek Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1977.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia Vol. 5.*, Jakarta: Ichtar Baru, 1984.
- Siregar, Ashadi. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta, LP3YS, 1999.
- Sobur, Alek. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suryadi. *Syair Sunur: Teks dan Konteks "Otobiografi" Seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19*, Padang: Citra Budaya Indonesia, Padang & Yayasan Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Padang Panjang, 2004.
- Weiner, Myron. *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979.

Zed, Mestika. Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu Studi tentang Sejarah 1945-1995 (1st ed.), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980.

Zed, Mestika, Edy Utama & Hasril Chaniago. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995 (1st ed.), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Jurnal

Swift, M.G. (1971). "Minangkabau and Modernization", dalam *Anthropology in Oceania*, 1971.

Tanner, Nancy. "Disputing and dispute settlement among the Minangkabau of Indonesia", dalam *Indonesia* (8 Oktober 1969).

Van der Kroef, Justus M. "The Press in Indonesia: by-product of Nationalism", dalam *Journalism Quarterly* (Summer 337-66, 1954).

Tesis

Abdullah, Taufik. *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development* (Tesis M.A.), Ithaca, New York: Cornell University, 1967.

Asnan, Gusti. *Pers Islam di Sumatera Barat Awal Abad 20: Suatu Tinjauan dalam Hubungannya dengan Gerakan Pembaharuan*. (Tesis M.S., Jurusan Linguistik), Padang: Universitas Andalas, 1987.

Daulay, Zahara. *Minangkabau, a Preliminary Study of the Culture and People*. (M.S. Thesis), Ithaca, New York: Cornell University, 1960.

Smith, Edward Cecil. *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965* (Disertasi, School of Journalism, Graduate College), Iowa: University of Iowa, 1969.

Artikel Majalah

Ahmad, Zainal Abidin (1979). "Pers Islam dalam Zaman Kebangkitan", dalam *Panji Masyarakat* No. 383, 1979.

Anon. "Majalah Al Munir Media Dakwah Kaum Muda", dalam *Panji Masyarakat* No.493, 1986.

Anon. "Dari Hati ke Hati", dalam *Panji Masyarakat*, No.456, 1985.

Azwar, Nasrul (2007, 16 September). Padang Ekspres (judul artikel?)

Jasmi, Khairul. "Surat Kabar Minang: Konfigurasi Pemikiran Menakjubkan", dalam *Pantau*, 022, 4 Februari, 2002.

Simulie, Haji Kamardi Rais Dt. P. "Haji Miskin di Aie Tabik", Analisis dan Pemikiran SAGA [Group Padang Ekspres], Juni, 2002.

Artikel Surat Kabar

Bintang Hindia, No. 7, 1 April 1904.

Doenia Achirat (Fort de Kock, ed. Zain Maliki).

Insulinde, No. 1, 1 April 1901.

Insulinde, No. 4, 7 Februari 1905.

Kompas, 28 Oktober 2007.

Medan Prijaji, 1909.
Medan Prijaji, No. 25, 25 Juni 1910.
Panas (Silungkang, ed. Sumaiman Labay).
Pembrita Betawi, No. 261, 16 November 1908.
Perniagaan, No. 57, 11 Maret 1908.
Petir (Padang, ed. Madjid).
Revue de Paris. Retno Dhoemilah, No. 12, 13 Februari 1909.
Sasaran Rakjat (Solok, ed. SR).
Selompret Melajoe, No. 66, 3 Juni 1905.
Selompret Melajoe, No. 72, 1905.
Selompret Melajoe, No. 4, 25 Maret 1905.
Selompret Melajoe, No. 66, 3 Juni 1905.
Selompret Melajoe, No. 96, 11 Agustus 1906.
Signal (Sawahlunto, ed. Nawawi Arif dan Idroes).
Sinar Atjeh, No. 43, Juni 1908.
Sinar Sumatra. 6 September 1905.
Soeloeh Melajoe, No. 3, 1 November 1913.
Soeloeh Melajoe, No. 5, 1 Desember 1913.
Soeloeh Melajoe, No. 7, 1 Januari 1914.
Soeloeh Melajoe, No. 1, 15 Oktober 1913.
Soeloeh Melajoe, No. 2, 15 Oktober 1913.

Soeloeh Melajoe, No. 4, 15 November 1913.

Soeloeh Melajoe, No. 6, 15 Desember 1913.

Soeloeh Melajoe, No. 10, 15 Februari 1914.

Taman Sari, No. 62, 18 Maret 1909.

Taman Sari, No. 89, 23 April 1909.

Tjahaja Sumatra, 27 September 1909.

Makalah yang Tidak Dipublikasikan

Abdullah, Taufik. The Making of a Schakel Society: The Minangkabau Region in the Late Nineteenth Century. Diajukan di Dutch-Indonesian Historical Conference tahun 1978.

Ar-Rasuli, Syaikh Sulaiman. Makalah Kongres Ulama, Ninik Mamak dan Cerdik Pandai, Bukittinggi tanggal 4 Mei 1952.

Asnan, Gusti. Media Massa Sumatera Barat Dalam Lintasan Sejarah, makalah konferensi di Padang, 16 September, 2007.

Asril, H. Sutan Zaili. Perkembangan Media dan Industri Media di Masa Era Orde Baru dan Era Reformasi di Sumatera Barat, makalah di Evolution of Press in Minangkabau International Conference, Padang, 4 Juli, 2009.

Darwis, Yuliandre. The Evolution of Journalism in Minangkabau. Makalah di Evolution of Press in Minangkabau International Conference, Padang, 4 Juli, 2009.

Darwis, Yuliandre, Sejarah Pers Islam Sumatera Barat: Dari Pemikiran Politik Spiritualitas Berperang Menuju Politik Spiritualitas Pemikiran Untuk Berdialog. Makalah di Seminar Malido Nusantara pertama, Bukittinggi, 17 Desember, 2009.

Zed, Mestika. Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elite Minangkabau Moderen: Sumatera Barat Abad ke-19, makalah di Seminar Sejarah Lokal, Medan, 17 September, 1980.

Wawancara personal

Marthias Dusky Pandoe, reporter senior Sumatra Barat, mantan reporter *Kompas* Jakarta.

Khairul Jasmi, mantan Ketua Padang Press Club, Sumatra Barat. Juga mantan reporter *Harian Republika*, Jakarta. Kini Pemred *Harian Singgalang*.

Mestika Zed, dosen sejarah dan Direktur Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) di Air Tawar, Padang.

Gusti Asnan, Profesor Sejarah Universitas Andalas (Unand), Padang

Rujukan elektronik

Artikel internet berdasarkan sumber cetak

Azwar, Nasrul (2007, September 16). Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu, diambil bulan Januari 2010 dari http://andreasharsono.blogspot.com/2007/09/sejarah-pers-sumbar-dialihorang-lalu_16.html 108.

TENTANG PENULIS



Yuliandre Darwis, M. Mass. Comm., Ph.D

Pendidikan:

- S3 Mass Communication, Communication and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia.
- S2 Mass Communication, Communication and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia.
- S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 2004.
- D3 Teknik Informatika, FMIPA, Universitas Padjadjaran, 2002.
- SMU Negeri 3 Padang, 1998.

Pengalaman Organisasi:

- Wakil Ketua Komite Tetap Riset dan Reposisi UKM KADIN (Kamar Dagang dan Industri), 2013–2015.
- Ketua Kompartemen Kehumasan dan Media BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), 2013–2014.
- Ketua Divisi Industri Kecil Menengah DPP HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), 2013–2015.
- Ketua Dewan Pembina IDBUDPARINDO (Ikatan Duta Budaya dan Pariwisata Indonesia), 2012–2014.
- Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta, 2012–2016.
- Local President Junior Chamber International (JCI) West Sumatera 2012–2013.
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP ASITA (Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies), 2011–2015.
- Ketua ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) Korwil Sumatera Barat, 2012–2016.
- Wakil Ketua Bidang Luar Negeri DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Sumatera Barat, 2011–2014.
- Sekretaris Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Sumatera Barat, 2011–2013.
- Sekretaris Dewan Pembina IDBUDPARINDO (Ikatan Duta Budaya dan Pariwisata Indonesia), 2010–2012.
- Ketua ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) Cabang Padang, 2010–2012.
- Ketua Komite Tetap Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

- Kerja KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Sumatera Barat, 2010–2015.
- Ketua Tim Ahli Proyek Suvenir Jakarta, KADIN (Kamar Dagang dan Industri) DKI Jakarta, 2009–2013.
- Ketua Komite Tetap Hubungan Luar Negeri dan Investasi, KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kota Padang, 2009.
- Sekretaris Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Sumatera Barat, 2009–2011.
- Ketua Departemen Luar Negeri HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Sumatera Barat, 2008–2009.
- Ketua Bidang Humas dan Publikasi ASITA (Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies) Sumatera Barat, 2007–2011.
- Wakil Sekretaris Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Sumatera Barat, 2007–2010.
- Wakil Sekretaris Bidang Luar Negeri KNPI Sumatera Barat, 2008–2011.
- Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO), 2005–2007.
- Vice President, International Student Society UiTM Malaysia, 2006–2007.
- Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) UiTM Malaysia, 2006.
- Ketua Umum Ikatan Uda Uni Sumatera Barat, 2005–2009.
- Sekretaris II Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD), 2004–2008.
- Ketua Presidium/Presiden Mahasiswa BEM-FORGAB

- KEMA Universitas Padjadjaran, 2001–2002.
- Ketua Umum Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Padjadjaran, 2001.
- Sekjen Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (FORKOM UKM) Universitas Padjadjaran, 2000–2001.
- Ketua Umum Unit Pecinta Budaya Minangkabau (UPBM) Universitas Padjadjaran, 2000–2001.

Pengalaman Kerja:

- Koordinator Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas, 2013–2017.
- Produser Film “Jejak Di Seribu Hujan” Winmark Pictures dan Sajadah Film, 2013.
- Ketua Program Studi S2 Komunikasi, Pascasarjana, Universitas Andalas, 2012–2013.
- Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2012–2013.
- Komisaris Utama PT Cita Beauty Primaeva, 2011–sekarang.
- Komisaris PT Inovasi Tritek Informasi, 2011–sekarang.
- Direktur Utama PT Mosaic Asia Indonesia, 2011–sekarang.
- Direktur Utama PT Uda Metromoney Exchange, 2010–sekarang.
- Direktur Utama PT Uda CS Holidays Indonesia Tour and Travel, 2008–sekarang.
- Dosen Komunikasi FISIP, Universitas Andalas, 2006–sekarang.
- Strategic Communication Manager SETIA

WORKSHOP, Sdn.Bhd–PROTON, Malaysia 2005–2007.

- General Manager PT BUMI PADJADJARAN (Management Building) Bandung, Jawa Barat, Jan 2005–Mei 2005.
- Juru Bicara/Penghubung Luar Negeri Gubernur Sumatera Barat untuk Luar Negeri 2005–2006.
- Direktur Komunikasi Strategis “Take A Stand Indonesia Institute” Bandung 2004–2005.
- Kepala Pemasaran “Mingguan Berita Merapi” Wilayah Jawa Barat 2000–2001.
- Wartawan Berita “Mingguan Berita Merapi” Wilayah Jawa Barat 1999–2000.

Prestasi

- Penghargaan TOYP Junior Chamber International (JCI) dalam bidang Academic Leadership 2013.
- 40 Tokoh Terbaik Inspiring Young Entrepreneurs; Penghargaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2012.
- Dosen Terbaik II Universitas Andalas dalam Bidang Kewirausahaan.
- Duta Muda UNESCO untuk Indonesia 2008.
- Utusan Indonesia Dalam UNESCO Youth Forum Conference Paris, Prancis 2007.
- Utusan Indonesia untuk Climate Change Conference, Berlin, Jerman 2007.
- Uda Sumatera Barat 2004 (Duta Wisata Sumatera Barat) 2004–2005.
- dan lain – lain.